

**ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA METRO
(Study di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)
Kota Metro Tahun 2015)**

(Tesis)

Oleh

MIRNAWATI



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRAK

ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA METRO (Studi di Tempat Pengolahan Akhir Sampah (TPAS) Kota Metro Oleh

MIRNAWATI

Sampah sebagai dampak dari pembangunan dengan berbagai macam permasalahan, menuntut perhatian secara khusus dari pemerintah. Untuk menghadapi tantangan tersebut Pemerintah Kota Metro melakukan upaya-upaya dengan menggabungkan UPT Kebersihan dengan Dinas Tatakota dan Pariwisata Kota Metro untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam pelayanan kebersihan. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumen. Adapun fokus penelitian adalah analisis kinerja Pengolahan Sampah di UPT Kebersihan Kota Metro dan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro.

Hasil penelitian menunjukkan Kinerja dari pengolahan sampah UPT Kebersihan Kota Metro cukup baik, Terbukti dengan kondisi kebersihan jalan utama, dan berprestasi, mampu mendapat piala Adipura, sebagai Kota Bersih, meningkatnya hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan Kota Metro, walaupun belum secara menyeluruh wilayah Kota Metro dapat terjangkau karena kurangnya jumlah Pekerja/ petugas pengangkut sampah serta sarana dan prasarana yang kurang memadai, untuk Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*.

Sedangkan prinsip efektivitas dan efisiensi pada UPT Kebersihan, memberikan sosialisasi tentang persampahan selama ini sudah berjalan baik dengan menempatkan tong tong sampah di tempat tempat umum, walaupun masih kurang tingkat kesadaran masyarakat membuang sampah pada tempatnya, karena kurangnya sosialisasi cara membuang sampah yang benar pada tempatnya. Untuk mengangkut sampah di Kota Metro Dinas Tata Kota dan Pariwisata (Distakopar) melalui UPT kebersihan mengandalkan 12 dump truck dan 6 amrol yang ditinggalkan di tempat pembuangan sementara (TPS) dan 7 unit bentor (becak montor) Bawa ke TPAS. Yang menjadi Kendala Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro yaitu Kendala Sumber Daya Manusia (SDM).

Kata kunci : Kinerja, pengolahan

ABSTRACT

PERFORMANCE ANALYSIS OF WASTE MANAGEMENT IN THE CITY METRO (Studies in Final Waste Processing Sites (TPAS) Cities Metro

By

MIRNAWATI

Waste as the impact of development with a variety of problems, demanding special attention from the government. To address these challenges, Metro City Government to make efforts to merge with the Office UPT Cleanliness Tatakota and tourism Metro City to create efficiency and effectiveness in the service of cleanliness. In this research using descriptive research method with qualitative approach. Researchers used data collection techniques through interviews, observation, and documents. The focus of the research is the analysis of the performance of Waste in Metro City Sanitation Unit, and the application of the principles of Good Governance in UPT Cleanliness Metro City.

The results showed Performance Of sewage treatment UPT Cleanliness Metro City quite well, evidenced by the hygiene conditions of the main road, and achievement, able to earn trophies Verse, a Clean City, increasing the results of revenue (PAD) from the levy cleanliness of Metro City, although it has not been thorough City area Metro accessible because of his lack of the number of worker / clerk pengakut garbage and facilities are inadequate, for the adoption of the principles of Good Governance, UPT Cleanliness Metro apply the principle of participation that the increased awareness and public confidence in the UPT Cleanliness Metro City with the volume of waste generated Metro city is quite high, it terlihat of incoming data to Landfill Waste (TPAS) in Karangrejo Metro Tinur reached 210-225 cubic, public participation in the separation of household waste organic and inorganic, and physical activity / work devotion.

While the principle of effectiveness and efficiency in UPT Cleanliness, provide socialization on waste has been running well by placing cans trash cans in public places, although it is still less than the level of public awareness dispose of waste in place, due to the lack of socialization how to dispose of garbage properly in place. To transport garbage in Metro City Department of City Planning and Tourism (Distakopar) through UPT cleanliness rely 12 and 6 amrol dump truck abandoned in a Dumpster (TPS) and 7 units bentor (rickshaw montor) Bring to TPAS. Which became Constraints Application of the principles of Good Governance in UPT Cleanliness Metro City is Constraints Human Resources (HR). And Financial Constraints.

Keywords: Performance, management

**ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH DI KOTA
METRO
(Studi di tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kota
Metro Tahun 2015)**

Oleh

MIRNAWATI

(Tesis)

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS (M.Si)
Pada
Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

Judul Tesis : **ANALISIS KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH DI
KOTA METRO
(Studi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS)
Kota Metro Tahun 2015)**

Nama Mahasiswa : **Mirna Wati**

No. Pokok Mahasiswa : **1426061024**

Program Studi : **Magister Ilmu Administrasi**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

MENYETUJUI

Komisi Pembimbing


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002


Dr. Deddy Hermawan, M.Si.
NIP 19750720 200312 1 002

MENGETAHUI

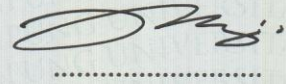
Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Lampung


Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.
NIP 19630206 198803 1 002

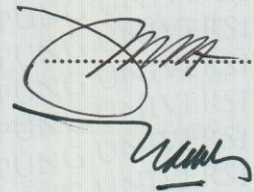
MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Dr. Noverman Duadji, M.Si.**



Sekretaris : **Dr. Deddy Hermawan, M.Si.**



Penguji Utama : **Dr. Bambang Utoyo S, M.Si.**

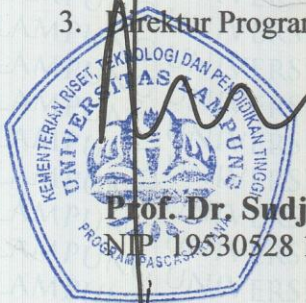


2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP 19530528 198103 1 002

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **24 Februari 2017**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Artikel atau Makalah Ilmiah yang dimuat dan dipublikasikan di E-Jurnal MIA dengan Judul “Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di Kota Metro (Studi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kota Metro ” adalah karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan Etika Ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiatisme.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2017

Yang Membuat Pernyataan,



Mirawati
NPM. 1426061024

RIWAYAT HIDUP

Penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara yang merupakan anak dari pasangan Bapak Purnomo dan Ibu Rusmiyati Terlahir dengan nama Mirnawati, dengan harapan dapat menjadi manusia yang selalu bersyukur dan memiliki jiwa yang besar. Penulis lahir di Kota Metro pada tanggal 5 mei 1989.



Penulis memulai jenjang pendidikannya di Taman Kanak-Kanak (TK) Aisyah, kemudian penulis melanjutkan Sekolah Dasar (SD) di SD.N.2 Metro Selatan, selanjutnya penulis mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP.N 5 Metro Lampung dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Muhammadiyah I Metro Lampung.

Pada tahun 2007 penulis tercatat sebagai mahasiswa Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah melalui jalur Penelusuran Kemampuan Akademik dan Bakat (PKAB) dan lulus pada tahun 2011. Kemudian pada tahun 2014, penulis kembali meneruskan Pendidikan Pasca Sarjana pada Program Studi Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

MOTTO

Selalu berlatih untuk memperbaharui diri agar mampu

berprestasi tinggi

(Stephen R.Covey)

*Pekerjaan adalah tanda kekhasan (basic nature) manusia dan
sekaligus menjadi tanda bahwa manusia merupakan mahluk*

sosial

(Frederick Engel)

Cerdas, jujur, dapat dipercaya dan amanah adalah bekal terkuat

menuju kesuksesan

(Mirnawati)

Gelar dan ilmu tertinggi adalah ketika berhasil membuka

harapan dan jalan bagi banyak orang untuk menghadapi

kehidupan

(Mirnawati)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada ALLAH SWT

Kupersembahkan karya ku ini untuk:

Suami dan anak ku

Yang selalu mensupport dan penyemangat segalanya

Bapak dan ibu ku Tercinta

Yang selalu membimbingku sejak kecil hingga saat ini dengan penuh

rasa sabar dan kasih sayang

Terimakasih atas keikhlasan dan ketulusan serta do'a yang tak henti-

hentinya selalu berikan.

Adik dan sahabat ku

Yang selalu memberikan keceriaan selama ini dalam kehidupanku.

Para Pendidik dan Almamater Universitas Lampung

Yang selalu memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah

jauh lebih baik kedepan.

SANWACANA

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, penulis ucapkan atas kehadiran ALLAH SWT yang telah memberikan ridho, rahmat, karunia dan kasih sayang-NYA yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di Kota Metro (Studi di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) di Kota Metro)*”. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan pada penyusunan tesis di Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Tak lupa pula, pada kesempatan ini penulis haturkan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Syarif Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Negara yang juga sekaligus menjadi penguji utama dalam tesis ini yakni Dr. Bambang Utoyo, M.Si terima kasih sudah memberikan banyak sekali ilmu dan masukan serta nasehat kepada penulis. Semoga penulis bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan baik dalam pekerjaan maupun di masyarakat. Terima kasih atas kesediannya dalam meluangkan waktu dan pemikirannya untuk memberikan kritik dan sarannya yang begitu

membangun dalam penyelesaian tesis ini. Penulis mohon maaf atas setiap kesalahan dan kelalaian penulis selama ini.

3. Bapak Dr. Noverman Duadji, M.Si selaku Pembimbing Utama sekaligus Pembimbing Akademik atas kesabaran dan motivasinya dalam membimbing penulis selama proses penyusunan tesis ini yang senantiasa memberi masukan serta nasehatnya, serta turut mendukung kelancaran dalam beberapa hal administratif penyusunan tesis ini.
4. Bapak Dr. Deddy Hermawan, M.Si selaku Pembimbing Kedua, atas kesetiaan dan kesabarannya dalam membimbing penulis selama proses bimbingan tesis ini. Penulis memohon maaf apabila selama pengerjaan tesis ini penulis melakukan kelalaian dan kesalahan.
5. Seluruh Dosen Program Studi Magister Ilmu Administrasi yang telah membagikan ilmunya dengan penuh kesabaran dan keikhlasan serta membimbing penulis selama menempuh studi.
6. Kedua Orang Tuaku Bapak Purnomo dan Ibu Rusmiyati terimakasih atas segala dukungan, doa, nasehat, dan arahan dalam proses penyusunan karya ini. Terimakasih untuk segala cinta dan kasih sayang yang penuh yang diberikan sejak lahir hingga saat ini dan seterusnya. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindunganNYA, selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah, serta bahagia di dunia dan akhirat. Amin.
7. Terima Kasih kepada keluarga kecil dan keluarga besarku. Atas doa dan harapan dan semangat yang selalu tercurahkan kepada penulis. Terutama suami dan anakku tersayang. Terima kasih sudah dengan sabar menunggu keberhasilan penulis.

8. Saudara kandungku, Irma Riyanti, terimakasih atas segala doa, dukungan, perhatiannya serta canda tawanya yang dihadiahkan dirumah sehingga menambah keceriaan.
9. Keluarga besar MIA Publik dan Bisnis angkatan genap 2014. MbK erni, MbK maria, Sera, Reza, Pak Marsudi, MbK Tuti, Theo, Devi, Regina, Dina, Pandu, Melisa, hariadi, terimakasih atas kebersamaannya selama di perkuliahan, semoga ukhuwah selalu terjaga dan sukses selalu.
10. Kepada Pimpinan STISIPOL Dharma Wacana Metro Bapak Sudarman Mersa, S.Sos., M.IP beserta seluruh pejabat dan staf. Terima kasih atas bantuan, motivasi, pengertiannya kepada penulis.
11. Civitas Akademika dan seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah membalas kebaikan kalian. Amin yaa Robbal Alamiin.

Sangat disadari dalam tesis ini terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu semua saran dan kritik penulis terima dengan lapang dada demi kesempurnaan penulisan tesis ini. Akhirnya harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua.

Bandar Lampung, 24 Februari 2017

Penulis,

Mirawati

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

RIWAYAT HIDUP

PERSEMBAHAN

MOTTO

SANWACANA

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR BAGAN

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. <i>Good Governance</i>	18
1. Pengertian <i>Good Governance</i>	18
2. Aktor-aktor <i>Good Governance</i>	21
3. Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i>	23
4. Indikator <i>Good Governance</i>	30
5. Kendala mewujudkan <i>Good Governance</i>	33
B. Organisasi Publik	40
1. Pengertian Organisasi Publik	40
2. Ciri-Ciri Organisasi Publik.....	41
3. Jenis-Jenis Organisasi	42
4. Pengertian Sampah	45
C. Kerangka Fikir.....	49

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	54
B. Fokus Penelitian.....	55
C. Lokasi Penelitian.....	58

D. Instrumen Penelitian	58
E. Informan dan Teknik Penarikan Informan Penelitian.....	59
F. Teknik Pengumpulan Data.....	62
G. Teknik Analisis Data.....	66
H. Teknik Keabsahan Data	70
I. Teknik Kesimpulan.....	74

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	75
1. Data Umum Kota Metro	75
a. Kondisi Geografis	75
b. Keadaan sosial ekonomi.....	78
c. Keadaan sosial budaya	80
2. UPT Kebersihan Kota Metro	83
3. Stuktur organisasi UPT Kebersihan Kota Metro	86
4. Tempat Pembuangan Akhir Sampah Kota Metro	91
B. Data Penelitian	99
1. Kinerja Dari pengolahan sampah di TPAS Kota Metro dan bagaimana hasilnya.....	99
2. Penerapan prinsip – prinsip <i>Good Governance</i> di UPT Kebersihan	105
3. Kendala penerapan <i>Good Governance</i> di UPT Kebersihan.....	141
C. Pembahasan Hasil Penelitian	151
1. Kinerja Dari pengolahan sampah di TPAS Kota Metro dan bagaimana hasilnya.....	151
2. Penerapan prinsip - prinsip <i>Good Governance</i> di UPT Kebersihan.....	154
3. Kendala penerapan prinsip - prinsip <i>Good Governance</i> di UPT Kebersihan.....	177

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	182
B. Saran	187

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Tabel 1. Indikator prinsip partisipasi.....	30
2. Tabel 2. Indikator prinsip efektifitas dan efisien.....	32
3. Tabel 1. Nama dan peran informan.....	60
4. Tabel 4.1 Kondisi tanah di Kota Metro.....	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Gambar 1. Kantor UPT Dinas Kebersihan.....	85
2. Gambar 2. Wawancara dengan Kepala UPT Kebersihan Kota Metro.....	101
3. Gambar 3. Wawancara dengan warga setempat (pemulung) TPAS Karang Rejo Metro Utara	111
4. Gambar 4. Lokasi Bank Sampah Karang Rejo Metro Timur.....	130
5. Gambar 5. Wawancara dengan masyarakat pengambil sampah.....	131
6. Gambar 6. Wawancara dengan operator alat berat di TPAS Kota Metro.....	132
7. Gambar 7. Wawancara dengan Kasubag TU UPT Kebersihan.....	138
8. Gambar 8. Kunjungan Walikota dan Wakil Walikota Metro dalam rangka peninjauan kebersihan lingkungan.....	138
9. Gambar 9. Pengarahan dari Walikota Metro Kepada Anggota Dinas Kebersihan.....	139
10. Gambar 10. Petugas kebersihan usai apel pagi Jum'at bersih.....	139
11. Gambar 11. Petugas Kebersihan saat absen pagi di UPT Kebersihan.....	140
12. Gambar 12. Petugas Bul Doser saat menggusur tumpukan sampah.....	140
13. Gambar 13. Lokasi TPAS.....	141

DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Bagan 1. Kerangka Fikir.....	49
2. Bagan 2. Analisis Data Model Interaktif.....	67
3. Bagan 1. Struktur Organisasi UPT Kebersihan Kota Metro	86
4. Bagan 2. Bentuk dan mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro.....	112

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Dalam konteks penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Publik memainkan sejumlah peran pentingnya. Peran Administrasi Publik adalah menyelenggarakan pelayanan publik guna mewujudkan salah satu tujuan utama dibentuknya negara, yakni kebahagiaan bagi masyarakatnya. Dalam konteks Indonesia misalnya, tujuan dari dibentuknya pemerintahan sebagaimana termasuk dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 diantaranya adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANKRI) adalah administrasi negara sebagai sistem yang dipraktekkan untuk mendukung penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) agar upaya Bangsa Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara dapat terlaksana secara berdaya guna dan berhasil guna.

Di era globalisasi saat ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah. Di sisi lain pengukuran keberhasilan maupun kegagalan instansi pemerintah dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sulit dilakukan secara obyektif, disebabkan oleh karena

belum diterapkannya sistem pengukuran kinerja yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan secara obyektif dan terukur dari pelaksanaan program-program di suatu instansi pemerintah.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah landasan bagi penyusunan dan penerapan kebijakan negara yang demokratis dalam era globalisasi. Fenomena demokrasi ditandai dengan menguatnya kontrol masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, sementara fenomena globalisasi ditandai dengan saling ketergantungan antara bangsa, terutama dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan aktivitas dunia usaha.

Konseptualisasi *Good Governance* lebih menekankan pada terwujudnya demokrasi, karena itu penyelenggaraan negara yang demokratis menjadi syarat mutlak bagi terwujudnya *Good Governance*, yang berdasarkan pada adanya partisipasi masyarakat, efektivitas dan efisiensi. Idealnya, ketiga hal itu akan ada pada diri setiap aktor institusional dimaksud dengan memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai moral yang menjiwai setiap langkah pemerintahan.

Good Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good Governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-perorang atau kelompok tertentu.

Sejak reformasi digulirkan, berbagai perubahan fundamental dalam tata kelola pemerintahan dikoreksi secara menyeluruh, tidak terkecuali di bidang pendidikan. Pemerintahan yang selama 32 tahun dibawah kekuasaan Orde Baru bersifat sangat sentralistik, dan kemudian mengalami perubahan yang signifikan menjadi pemerintahan desentralistik. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian mengalami penyempurnaan menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai dasar yuridis perubahan sistem pemerintahan di Indonesia.¹

Isu strategis yang terus disuarakan oleh berbagai kalangan terhadap negeri ini diantaranya adalah tuntutan terhadap adanya *Good Governance* Belakangan berkembang pula tuntutan penerapan *Good Corporate Governance* untuk sektor-sektor non pemerintahan, terutama pada perusahaan-perusahaan publik dan sejenisnya. Hal tersebut selama masa orde baru nyaris tidak pernah terdengar, sekarang justru berkembang menjadi fokus perhatian masyarakat terutama di kalangan UPT Kebersihan.

Adapun salah satu konsep yang saat ini sedang menjadi *mainstream* dalam Dinas Kebersihan Kota Metro adalah konsep tata pemerintahan yang lebih umum *Good Governance*. Prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari *Good Governance* masih relevan untuk diterapkan dalam kinerja pengolahan sampah. Dalam penyelenggaraannya, Dinas kebersihan harus memenuhi prinsip-prinsip

¹ Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Tentang Pemerintahan Daerah

partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum yang berbeda adalah nilai dan tujuan yang menjiwoinya.

Prinsip tata kelola yang baik, tidak hanya terbatas pada penggunaan peraturan dan ketentuan yang berlaku, melainkan dikembangkan dengan menerapkan prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik yang tidak hanya melibatkan pimpinan semata, tetapi harus melibatkan sistem administrasi maupun ekstern administrasi Dinas kebersihan. Dalam pemahaman ini, *Good Governance* bukan semata-mata mencakup relasi dalam pengelolaan Dinas Kebersihan. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga unsur ini dalam mengelola sumberdaya yang tersedia. Dari aplikasi ini akan muncul hubungan yang sinergis antara ketiga unsur sehingga terwujud pengelolaan Kota yang bersih, nyaman dan damai, serta kehidupan masyarakat yang baik.

Setiap manusia menginginkan hidup yang sehat aman tentram dan damai, sehingga setiap manusia menginginkan yang ada di sekelilingnya aman sehat tentram dan nyaman. Namun yang terjadi semakin bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan volume jenis sampah yang semakin beragam dan pengelolaan sampah selama ini belum sesuai dengan metode tehnik pengumpulan di TPS, pengangkutan dari TPS dan pengolahan di TPAS.

Mendengar istilah **Sampah** pasti sudah tidak asing lagi di telinga kita, terbayang dan terlintas dalam benak kita berupa tumpukan barang limbah yang tidak sedap dilihat serta beraroma busuk menyengat. Sampah diartikan sebagai material sisa

yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah adalah zat kimia, energi atau makhluk hidup yang tidak mempunyai nilai guna dan cenderung merusak.

Sampah merupakan konsep buatan manusia, dalam proses-proses alam tidak ada sampah, yang ada hanya produk-produk yang tak bergerak. Sampah dapat berada pada setiap fase/materi, yaitu fase padat, cair, atau gas. Ketika dilepaskan dalam fase cair dan gas, terutama dalam fase gas sampah ini disebut sebagai emisi berkaitan dengan polusi. Bila sampah masuk ke dalam lingkungan (ke air, ke udara dan ke tanah) maka kualitas lingkungan akan menurun. Peristiwa masuknya sampah ke lingkungan inilah yang dikenal sebagai peristiwa pencemaran lingkungan. Masalah persampahan merupakan sebuah tantangan yang akan menentukan *sustainability* lingkungan suatu Kota. Kegagalan menangani problem persampahan ini akan meningkatkan resiko warga kota berhadapan dengan berbagai macam penyakit yang akan meningkatkan biaya sosial untuk kesehatan. Selain itu sampah yang dibuang ke sungai dan saluran pembuangan berpotensi menimbulkan banjir. Kelompok pertama yang paling dirugikan adalah masyarakat miskin. Alasan tersebut menyebabkan Pemerintah Kota berkewajiban menyediakan sistem pengolahan sampah yang efektif, efisien dan terjangkau.

Berdasarkan sumbernya sampah terbagi menjadi sampah alam, sampah manusia, sampah konsumsi, sampah nuklir, sampah industri, dan sampah pertambangan.

Sedangkan menurut sifatnya sampah dibagi menjadi dua yaitu;

- 1) Sampah organik atau sampah yang dapat diurai (*degradable*) contohnya daun-daunan, sayuran, sampah dapur dll,

- 2) Sampah anorganik atau sampah yang tidak terurai (*undegradable*) contohnya plastik, botol, kaleng dll.

Dewasa ini sampah selalu identik dengan permasalahan di belahan dunia manapun. Problem klasik sampah selalu dihadapi oleh penduduk dunia, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena usaha mengurangi volume sampah lebih kecil dari pada laju produksinya. Sehingga keberadaan sampah semakin menumpuk di setiap penjuru lingkungan perkotaan. Dengan volume timbunan sampah berlebihan menyebabkan kegiatan pengangkutan dan mengolah di TPA diluar kapasitas yang ada. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung bagi penduduk dilingkungan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. Dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit menular, bau yang tidak enak, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air selokan dan sungai karena karena terhalang timbunan sampah.²

Sampah adalah sisa kegiatan manusia atau proses alam sehari-hari yang berbentuk padat. Dalam hal ini, sampah merupakan segala jenis benda buangan atau yang dibuang yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik dapat didaur ulang maupun tidak dapat didaur ulang. Pengelolaan sampah yang dimaksudkan sebagai kegiatan yang menyeluruh, dan berkesinambungan

² <http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html> di unduh tanggal 10 mei 2016 pukul : 21.45 wib

yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah mengenai pengertian sampah, sampah spesifik, sumber sampah, penghasil sampah, pengelolaan sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir, kompensasi, dan sistem tanggap darurat.

Adapun masalah yang ditemui di lapangan tepatnya di Kota Metro yakni dewasa ini sampah selalu identik dengan permasalahan di belahan Dunia manapun. Problem klasik sampah selalu dihadapi oleh penduduk dunia, terutama di wilayah perkotaan. Hal ini disebabkan karena usaha mengurangi volume sampah lebih kecil dari pada laju produksinya. Sehingga keberadaan sampah semakin menumpuk di setiap penjuru lingkungan perkotaan. Dengan volume timbunan sampah berlebihan menyebabkan kegiatan pengangkutan dan mengolah di TPA diluar kapasitas yang ada. Sebagai dampak langsung maupun tidak langsung bagi penduduk di lingkungan perkotaan, khususnya yang berdekatan dengan lokasi penumpukan sampah. Dampak langsung adalah timbulnya berbagai penyakit menular, bau yang tidak enak, serta mengganggu kebersihan dan keindahan lingkungan. Adapun dampak tidak langsungnya adalah bahaya banjir yang disebabkan oleh terhambatnya arus air selokan dan sungai karena terhalang timbunan sampah³

Permasalahan lingkungan yang umum terjadi di perkotaan adalah pengelolaan sampah perkotaan yang kurang baik. Sampah yang merupakan bagian sisa

³ Hasil wawancara dengan Bpk. Supriadi selaku Kepala UPT Kebersihan Kota Metro pada tanggal 10 Mei 2016, pukul 09.30 WIB.

aktifitas manusia perlu dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan berbagai permasalahan terhadap kehidupan manusia maupun gangguan pada lingkungan seperti pencemaran lingkungan, penyebaran penyakit, menurunnya estetika dan sebagai pembawa penyakit.

Permasalahan yang kedua dalam pengelolaan sampah yang sering terjadi antara lain perilaku dan pola hidup masyarakat masih cenderung mengarah pada peningkatan laju timbulan sampah yang sangat membebani pengelola kebersihan, keterbatasan sumber daya, anggaran, kendaraan personil sehingga pengelola kebersihan belum mampu melayani seluruh sampah yang dihasilkan. Pelayanan pengelolaan sampah termasuk dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk melayani masyarakat dalam pengelolaan sampah yang dihasilkan. Dalam pelayanan pengelolaan sampah sangat dibutuhkan kinerja atau performance yang baik sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan efektif dan efisien serta dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai pelanggan. Namun demikian, seringkali terjadi penanganan sampah perkotaan menjadi tidak efektif akibat keterbatasan Pemerintah baik dalam pembiayaan, jumlah personil maupun jumlah peralatan yang tersedia.

Dalam aspek pembiayaan, permasalahan yang umum terjadi terutama adalah masih rendahnya retribusi kebersihan yang tidak sebanding dengan biaya operasional dan pemeliharaan. Dalam aspek kelembagaan, yang umum terjadi adalah jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah sampah yang

dihasilkan maupun pengetahuan personil terhadap sistem pengelolaan sampah baik peran serta aktif maupun pasif.

Dalam hal penyediaan sarana persampahan adalah masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan truk pengangkutan. Pola pengangkutan sampah yang tidak efektif juga akan mempengaruhi jangkauan layanan maupun biaya operasional pengangkutan. Karena keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut maka perlu didukung adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.⁴

Sampah adalah sisa kegiatan manusia dan/atau proses alam sehari-hari yang berbentuk padat (Menteri Hukum dan HAM, 2008).⁵ Bertambahnya sampah erat kaitannya dengan peningkatan aktivitas manusia dan penambahan penduduk serta keanekaragaman kehidupan manusia. Hal ini berakibat pada menumpuknya sampah yang secara otomatis tidak dapat diuraikan oleh alam, hingga timbul berbagai pencemaran. Dengan demikian, sudah semestinya pada suatu daerah diperlukan sistem pengelolaan sampah tersebut. Begitu pula halnya dengan wilayah Kota Metro dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula bahan buangan atau sampah yang dihasilkan.

⁴ Hasil wawancara dengan Bpk. Supriadi selaku Kepala UPT Kebersihan kota Metro pada tanggal 10 mei 2016, pukul 09.30 WIB.

⁵ Menti Hukum dan HAM, 2008

Tingginya aktivitas penduduk di Kota Metro secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya. Dalam hal ini, sampah merupakan segala jenis benda buangan atau yang dibuang yang dihasilkan dari segala aktivitas manusia, baik dari kegiatan rumah tangga, komersial, industri, maupun proses-proses alam yang berbentuk padat, baik dapat didaur ulang maupun tidak dapat didaur ulang. Pengelolaan sampah yang dimaksudkan sebagai kegiatan yang menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah mengenai pengertian sampah, sampah spesifik, sumber sampah, penghasil sampah, pengelolaan sampah, tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, tempat pemrosesan akhir, kompensasi, dan sistem tanggap darurat. Masalah utama penanganan sampah merupakan urusan mental dan spiritual yang mempengaruhi cara pandang, sudut pandang, gaya, dan pola perilaku hidup. Butuh kesadaran tinggi dari masyarakat supaya tidak membuang sampah sembarangan.⁶

Bertambahnya sampah erat kaitannya dengan peningkatan aktivitas manusia dan pertambahan penduduk serta keanekaragaman kehidupan manusia. Hal ini berakibat pada menumpuknya sampah yang secara otomatis tidak dapat diuraikan oleh alam, hingga timbul berbagai pencemaran. Dengan demikian, sudah semestinya pada suatu daerah diperlukan sistem pengelolaan sampah tersebut. Begitu pula halnya dengan Wilayah Kota Metro, dengan bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula bahan buangan atau sampah yang dihasilkan.

⁶ www.sebatin.com/sampah Kota Metro

Tingginya aktivitas penduduk di Kota Metro secara tidak langsung akan mempengaruhi jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya.

Dalam pengelolaan persampahan masyarakat harus dilibatkan sebagai pihak utama atau subjek pembangunan. Untuk mengurangi beban pemerintah dalam pengolahan sampah, maka harus dilakukan manajemen pengelolaan sampah yang lebih baik dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat melalui proses pemilahan sampah sejak dari sumbernya dan daur ulang (*recycling*). Pengurangan sampah langsung dari sumbernya merupakan metode pengelolaan sampah alternatif yang ramah lingkungan disamping mempunyai nilai ekonomi.

Jika tidak dilakukan pengelolaan sampah oleh masyarakat maka semua sampah yang dihasilkan oleh masyarakat kota diserahkan pada Dinas terkait (dalam hal ini Dinas Kebersihan dan pertamanan) untuk di buang ke TPA. Selain menambah beban volume sampah, hal ini akan menambah beban pemerintah dalam menanggulangi sampah.

Secara umum, kondisi persampahan di Kota Metro dikatakan baik walaupun masih banyak terdapat timbunan sampah yang berada di bahu jalan atau di lahan kosong tanpa wadah. Kondisi tersebut dapat menyebabkan lingkungan di sekitarnya menjadi tidak nyaman dan tidak sehat seperti menyebarkan bau yang tidak sehat, rentan terhadap penyakit, serta pemandangan yang tidak indah. Sistem pengangkutan yang dilakukan petugas kebersihan masih perlu dikaji kembali, dimana masih terjadinya keterlambatan dalam waktu pengangkutan sampah sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang membuang sampah di

sembarang tempat yang disebabkan terlalu banyaknya sampah yang bertumpuk, belum lagi ditambah dengan bau sampah itu sendiri. Hal ini apabila terus dilakukan, maka semakin lama akan terjadi pencemaran lingkungan.⁷

Kehidupan manusia tidak lepas dengan sampah. Setiap orang, pasti menghasilkan sampah. Menurunnya kualitas lingkungan yang disebabkan oleh sampah terkait dengan adanya hubungan yang erat dan timbal balik antara jumlah penduduk, nilai dan perilaku masyarakat terhadap perwujudan sampah, organisasi pengelola sampah, serta sistem pengelolaan yang dilakukan. Di negara-negara berkembang termasuk Indonesia persoalan sampah lebih banyak disebabkan masalah sosialnya, dibandingkan dengan masalah teknologinya. Hal ini disebabkan karena persoalan teknologi pengolahan sampah sebenarnya sudah ada. Hanya penerapannya saja yang memerlukan penyesuaian-penyesuaian dengan kondisi setempat. Sedangkan persoalan sosial atau masyarakat memerlukan pendalaman khusus karena terkait dengan nilai dan norma masyarakat.

Bila timbunan sampah ini tidak dikelola dengan baik, maka masalah sampah ini telah membawa akibat berantai bagi pencemaran lingkungan berupa : bau busuk yang mengganggu warga yang berada di dekat pembuangan sampah, mempercepat atau menjadi sumber penularan penyakit, tersumbatnya saluran Drinase dan aliran sungai. Tidak seimbangny sarana persampahan serta

⁷ Hasil Wawancara dengan Bpk. Sahril selaku Kepala Dinas Pasar Kota Metro. Pada tanggal 7 mei 2016

pengelolaan yang baik menjadikan tingkat layanan tidak optimal. Untuk menciptakan lingkungan yang bersih tidak terlepas dari kehidupan manusia, sehingga peran serta masyarakat dan dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan untuk mendukung kondisi tersebut.

Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat merupakan kewajiban setiap negara. Kebutuhan tersebut dipenuhi melalui pelayanan publik. Pelayanan publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 didefinisikan sebagai kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik antara daerah pedesaan dan perkotaan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2010 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan. Dalam peraturan tersebut, standar pelayanan perkotaan untuk Kota pemukiman ini meliputi perumahan; air minum; drainase; prasarana jalan lingkungan; persampahan; air limbah; energi; komunikasi dan informasi; dan ruang terbuka hijau. Akan tetapi, pelayanan perkotaan ini tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dengan baik oleh pemerintah kota setempat, seperti pelayanan persampahan. Hal ini terjadi karena sampah sering kali dianggap sesuatu yang tidak berguna padahal sampah juga menimbulkan masalah yang cukup serius terhadap lingkungan. Peningkatan jumlah penduduk menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan makin bertambah

pula. Peningkatan jumlah sampah tersebut seringkali tidak diimbangi dengan oleh sistem pengelolaan sampah yang baik.

Di Indonesia dengan semakin meningkatnya jumlah sampah maka pola lama pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan-pengangkutan-pembuangan (P3) mulai bergeser ke pemilahan-pengolahan-pemanfaatan-pembuangan residu (P4). sebagaimana diundangkannya UU RI No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu dalam Rencana Nasional Sanitasi Lingkungan Berbasis Masyarakat juga telah dicantumkan bahwa penanganan sampah memerlukan upaya mulai dari partisipasi masyarakat hingga pemerintah.⁸

Pengolahan sampah menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh pada biaya pengolahan. Sampah yang tercampurkan membutuhkan biaya pengolahan yang lebih mahal. Oleh karena kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan jenis sampah yang lain. Lalu bagaimana pengelolaan sampah yang berasal dari rumah tangga akan di bahas dalam tesis ini. Dimana dalam proses pengelolaannya masyarakat berperan dalam pengelolaan dan memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik.

Dalam melakukan penelitian mengenai Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di Kota Metro, peneliti memaparkan beberapa teori yang menjadi pondasi dalam membahas hasil penelitian. Hal ini dimaksudkan agar mempermudah dalam

⁸ UUD RI No 18/2008 tentang pengelolaan sampah

menyusun berbagai temuan-temuan yang di dapat dan di kaitkan dengan teori-teori yang menjadi landasan dalam proses penelitian ini. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam menyusun kerangka pemikiran dalam penelitian ini di jelaskan dalam sub bab dibawah ini.

Paradigma *Good Governance* pada Dinas Kebersihan saat ini menjadi pilihan yang handal untuk mencapai suksesnya organisasi. Secara umum, tata kelola terkait dengan aspek transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efisiensi dan efektifitas dan sebagainya. Namun tata kelola menjadi persoalan lebih rumit manakala tuntutan tata kelola yang baik mengharuskan adanya perubahan dan inovasi dari sistem yang ada dalam mencapai visi dan misi Dinas kebersihan.

Sementara itu, *Good Governance* juga turut diterapkan pada Dinas Kebersihan Kota Metro. Maka dibutuhkan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan sistem informasi yang mampu memberikan pelayanan yang baik terhadap masyarakat dan semua *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Namun hal ini masih belum tampak dilaksanakan dengan baik dan maksimal oleh UPT Kebersihan yang sedang mewujudkan *Good Governance*. Berbagai pembenahan fasilitas dilakukan demi meningkatkan citra Dinas Kebersihan Kota Metro . Akan tetapi perbaikan fasilitas yang dilakukan kurang mendukung Dalam hal penyediaan sarana persampahan adalah masih terbatasnya peralatan seperti kontainer, dan truk pengangkutan. Pola pengangkutan sampah yang tidak efektif juga akan mempengaruhi jangkauan layanan maupun biaya operasional pengangkutan.

Karena keterbatasan pemerintah dalam pengelolaan sampah tersebut maka perlu didukung adanya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.⁹

B. Rumusan Masalah

Dengan melihat masalah pada uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kinerja dari pengolahan sampah di TPAS Kota Metro dan bagaimana hasilnya
2. Bagaimanakah penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro ?
3. Apa saja kendala penerapan prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan sampah dan hasil yang dicapai oleh Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) Kota Metro

⁹ Hasil wawancara dengan Bpk. Supriadi selaku Kepala UPT Kebersihan kota Metro pada tanggal 10 mei 2016, pukul 09.30 WIB.

2. Untuk mendeskripsikan penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro
3. Untuk mengidentifikasi kendala penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini dapat memberi sumbangan pemikiran bagi kemajuan pengetahuan Ilmu Administrasi Publik di bidang kajian *Good Governance* khususnya yang berkaitan dengan kemajuan bidang kajian Tata kelola urusan publik yang terjadi di Kota Metro dengan konsep-konsep atau teori-teori dan prakteknya tentang *Good Governance*.
2. Secara praktis, Hasil penelitian merupakan input bagi pemerintah Kota Metro tentang tata kelola sampah dan hasil gambaran atau hasil pengelolaan sampah yang dilakukan Dinas kebersihan sehingga pemerintah dapat menentukan langkah perbaikan terhadap kondisi yang ada .

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Good Governance

1. Pengertian Good Governance

Menjelang berlangsungnya reformasi politik di Indonesia atau sekitar tahun 1996, beberapa lembaga internasional seperti *United Nations Development Programme* (UNDP) dan *World Bank*, memperkenalkan terminologi baru yang disebut sebagai *Good Public Governance* atau *Good Governance*. Menurut Weiss dalam Suharko (2005:52-53), “konsep tata pemerintahan (*Governance*) bukanlah konsep yang baru, tetapi setua usia sejarah umat manusia”.¹⁰ Namun baru sejak 1980-an konsep tersebut menjadi bagian dari perdebatan intelektual. Terdapat konsensus bahwa konsep tata pemerintahan (*Governance*) umumnya lebih luas dibanding konsep pemerintahan (*Government*). Bahkan definisi tentang tata pemerintahan secara substansial sangat bervariasi. Para ahli dan berbagai organisasi internasional memiliki definisi sendiri-sendiri tentang tata pemerintahan.

Istilah *Good Governance* sering digunakan dalam beberapa penelitian, khususnya disiplin ilmu sosial. Cagin dalam Syahriani (2009:121) mengemukakan “konsep *Governance* merujuk pada institusi, proses, dan tradisi yang menentukan bagaimana kekuasaan diselenggarakan, keputusan dibuat, dan suara warga didengar”. “*Governance refers to the institution, processes, and traditions which*

¹⁰ Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta. Tiara Wacana.

devine how powers is exercised, how decisions are made, and how citizens have their say.” Definisi yang hampir sama dikemukakan oleh *Institute on Governance* (IOG) dalam Syahriani (2009:121) “*governance refers to the institution, processes, and traditions which devine how powers is exercised, how decisions are made, and how decisions are made, and how decisions are made on issues of public concerns.*”¹¹

Istilah *Governance* diatas menunjukkan suatu proses dimana rakyat bisa mengatur ekonominya, institusi dan sumber-sumber sosial dan politiknya tidak hanya dipergunakan untuk pembangunan, tetapi juga untuk menciptakan integrasi, kohesi dan untuk kesejahteraan rakyat. Dengan demikian, bahwa kemampuan suatu negara mencapai tujuan negara sangat tergantung pada kualitas tata pemerintahan di mana pemerintah melakukan interaksi dengan sektor swasta dan masyarakat. Secara konseptual pengertian kata baik (*Good*) dalam istilah pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mengandung dua pemahaman, yakni: 1) Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan nasional kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, 2) Aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, *Good Governance* diterjemahkan sebagai tata pemerintahan yang baik, namun ada yang menerjemahkan sebagai

¹¹ Syahriani., Syakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di samping itu, arti yang lain *Good Governance* sebagai pemerintahan yang amanah. Jika *Good Governance* diterjemahkan sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, maka *Good Governance* dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan.

Definisi *Good Governance* menurut ahli dan institusi negara, yakni antara lain menurut Kooiman dalam Sedarmayanti (2009:274) mengatakan bahwa “*Governance* merupakan serangkaian proses interaksi sosial politik antara pemerintahan dengan masyarakat dalam berbagai bidang yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan intervensi pemerintah atas kepentingan-kepentingan tersebut”.¹² Peraturan Pemerintah Nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *Good Governance* sebagai berikut: “Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat”.¹³ Sedangkan *World Bank* dalam Sedarmayanti (2009:273) mengartikan “*Good Governance* sebagai penyelenggara manajemen pembangunan solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan pencegahan korupsi secara politik dan administratif, menjalankan disiplin

¹² Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Kepemerintahan Yang Baik)*. Bandung. PT Refika Aditama.

¹³ Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000. Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil.

anggaran serta menjalankan kerangka kerja politik dan hukum bagi tumbuhnya aktivitas kewiraswastaan”.¹⁴

Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa *Good Governance* (tata pemerintahan yang baik) adalah seperangkat proses yang yang diberlakukan dalam organisasi baik negeri, sipil, maupun swasta untuk menentukan keputusan. *Good governance* juga dapat di artikan sebagai tindakan atau tingkah laku yang didasarkan pada nilai-nilai yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Indikator pemerintah yang baik adalah jika mampu produktif dan memperlihatkan hasil dengan indikator kemampuan ekonomi rakyat meningkat dalam aspek produktivitas maupun dalam daya belinya, kesejahteraan spiritualitasnya terus meningkat dengan indikator rasa aman, tenang, dan bahagia serta rasa nasionalitas yang baik.

2. Aktor-Aktor Good Governance

Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sebagai sistem administrasi yang melibatkan banyak pelaku (multi *stakeholders*), baik dari pemerintah maupun di luar pemerintah. Aktor-aktor *Good Governance* menurut Sedarmayanti (2009:280) antara lain:

- a. Negara atau pemerintah: konsepsi pemerintahan pada dasarnya adalah kegiatan-kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu melibatkan pula

¹⁴ Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. PT Refika Aditama.

sektor swasta dan kelembagaan masyarakat madani. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Dalam kaitannya dengan bidang pendidikan, pemerintah dan dinas-dinas yang berkaitan seperti Dinas Pendidikan. Negara sebagai salah satu unsur *governance*, di dalamnya termasuk lembaga politik dan lembaga sektor publik. Peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam memfasilitasi terjadinya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang terjadi di dalam pasar dapat dihindari.

- b. Sektor swasta: pelaku sektor swasta mencakup perusahaan swasta yang aktif dalam interaksi dalam sistem pasar, seperti industri pengolahan perdagangan, perbankan, koperasi termasuk kegiatan sektor informal. Dalam bidang pendidikan, sektor swasta meliputi yayasan-yayasan yang mengelola sekolah swasta.
- c. Masyarakat madani: kelompok masyarakat dalam konteks kenegaraan pada dasarnya berada diantara atau di tengah-tengah antara pemerintah dan perseorangan, yang mencakup baik perseorangan maupun kelompok masyarakat yang berinteraksi secara sosial, politik, dan ekonomi.¹⁵

Dapat disimpulkan, dari ketiga aktor *Governance* tersebut merupakan unsur yang berada dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat. Sektor pemerintahan lebih banyak memainkan peranan sebagai pembuat kebijakan, pengendalian dan pengawasan. Sektor swasta lebih banyak berkecimpung dan menjadi penggerak aktifitas di bidang ekonomi. Sedangkan sektor masyarakat

¹⁵ Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. PT Refika Aditama.

merupakan objek sekaligus subjek dari sektor pemerintahan maupun swasta. Karena di dalam masyarakatlah terjadi interaksi di bidang politik, ekonomi, maupun sosial budaya. *Good Governance* memungkinkan adanya kesejajaran peran antara ketiga aktor di atas. Sebagaimana dalam pengembangan kapasitas *Good Governance*, ada yang disebut dengan perubahan dalam distribusi kewenangan yaitu telah terjadi distribusi kewenangan yang tadinya menumpuk di pusat untuk didesentralisasikan kepada daerah, masyarakat, asosiasi dan berbagai kelembagaan yang ada di masyarakat. Artinya saat ini pemerintah bukanlah satu-satunya aktor dalam pengambilan keputusan, masyarakat dan juga pihak swasta berkesempatan untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

3. Prinsip-Prinsip Good Governance

Prinsip dasar yang melandasi perbedaan antara konsepsi pemerintahan (*Governance*) dengan pola pemerintahan yang tradisional, adalah terletak pada adanya tuntutan yang demikian kuat agar peranan pemerintah dikurangi dan peranan masyarakat (termasuk dunia usaha dan Lembaga Swadaya Masyarakat/organisasi non pemerintah) semakin ditingkatkan dan semakin terbuka aksesnya. Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004, disebutkan perlunya pendekatan baru dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan dan terarah pada terwujudnya pemerintahan yang baik yakni “proses pengelolaan pemerintahan yang demokratis, profesional menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia, desentralistik, partisipatif,

transparan, keadilan, bersih dan akuntabel, selain berdaya guna, berhasil guna dan berorientasi pada peningkatan daya saing bangsa”.¹⁶

Banyak pendekatan dikembangkan oleh para ahli untuk mengukur tingkat keberhasilan dan pelembagaan *Good Governance*. UNDP mendekatinya dengan prinsip-prinsip, yang kemudian dikenal dengan prinsip-prinsip *Good Governance*. UNDP mengemukakan sembilan prinsip yakni:

a) Partisipasi (*participation*)

Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruktif.

b) Penegakan hukum (*Rule of law*)

Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan-perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan hukum. Tanpa diimbangi oleh sebuah hukum, dan penegakannya yang kuat, partisipasi akan berubah menjadi proses politik yang anarkis. Kerangka hukum harus adil dan diberlakukan tanpa pandang bulu, termasuk didalamnya hukum-hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Karakter dalam menegakkan *rule of law* yakni: 1) Supremasi hukum (*the supremacy of law*), 2) Kepastian hukum (*legal certainty*), 3) Hukum yang

¹⁶ Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004.

responsif, 4) Penegakan hukum yang konsisten dan non diskrimnasi, dan 5) Independensi peradilan.

c) Transparansi (*Transparantion*)

Transparansi dibangun atas dasar informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintah, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Aspek mekanisme pengelolaan negara yang harus dilakukan secara transparan setidaknya ada delapan aspek yaitu : 1) Penetapan posisi, jabatan atau kedudukan, 2) Kekayaan pejabat publik, 3) Pemberian penghargaan, 4) Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan kehidupan, 5) Kesehatan, 6) Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik, 7) Keamanan dan ketertiban, dan 8) Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat.

d) Responsif (*Responsiviness*)

Peduli dan *stakeholder* lembaga-lembaga dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Pemerintah harus cepat tanggap terhadap persoalan-persoalan masyarakat.

e) Orientasi kesepakatan (*consensus orientation*)

Tata pemerintahan yang baik menjembatani kepentingan-kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus menyeluruh dalam hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin, konsensus dalam hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Pengambilan keputusan melalui proses musyawarah dan semaksimal mungkin berdasarkan kesepakatan bersama.

f) Kesetaraan (*equity*)

Semua warga masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraan mereka, serta kesamaan dalam perlakuan pelayanan.

g) Efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*)

Proses-proses pemerintahan dan lembaga-lembaga membuahkan hasil sesuai kebutuhan warga masyarakat dan dengan menggunakan sumber-sumber daya yang ada seoptimal mungkin.

h) Akuntabilitas (*accountability*)

Para pengambil keputusan di pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat bertanggungjawab, baik kepada masyarakat maupun kepada lembaga-lembaga yang berkepentingan. Setiap pejabat publik dituntut untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, perbuatan, moral, maupun netralitas sikapnya terhadap masyarakat.

i) Visi strategik (*strategic vision*)

Para pemimpin dan masyarakat memiliki perspektif yang luas dan jauh ke depan atas tata pemerintahan yang baik dan pembangunan manusia, serta kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut. Selain itu mereka juga harus memiliki pemahaman atas kompleksitas kesejarahan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut.¹⁷

¹⁷ UNDP. 1997. *Governance for Suitable Development-A Policy Document*. New York: UNDP.

Keseluruhan karakteristik atau prinsip *Good Governance* tersebut adalah saling memperkuat dan saling terkait serta tidak bisa berdiri sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat empat prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

- a. *Akuntabilitas*, adanya kewajiban bagi aparatur pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. *Transparansi*, pemerintahan yang baik akan bersifat transparan terhadap rakyatnya baik ditingkat pusat maupun daerah.
- c. *Keterbukaan*, menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilainya tidak transparan.
- d. *Aturan hukum*, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 prinsip-prinsip pemerintahan yang baik terdiri dari:

- a. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara pemerintahan agar mampu memberi pelayanan yang mudah, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau.
- b. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat.

- c. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai.
- d. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin.
- e. Demokrasi dan Partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.
- f. Efisiensi dan Efektifitas, menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.
- g. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁸

Sedangkan Lembaga Administrasi Negara (LAN) mengungkapkan prinsip-prinsip *Good Governance* antara lain yaitu akuntabilitas, transparansi, kesetaraan,

¹⁸ <http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581>

supremasi hukum, keadilan, partisipasi, desentralisasi, kebersamaan, profesionalitas, cepat tanggap, efektif dan efisien, dan berdaya saing.¹⁹

Dari berbagai prinsip di atas, jumlah komponen ataupun prinsip yang melandasi tata pemerintahan yang baik sangat bervariasi dari satu institusi ke institusi lain, dari satu pakar ke pakar lainnya. Namun paling tidak ada sejumlah prinsip yang dianggap sebagai prinsip-prinsip utama yang melandasi *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro, yaitu partisipasi, efektivitas dan efisiensi. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* tidak terlepas dari peran pemerintah, swasta, masyarakat dan *stakeholder* yang berkepentingan demi memajukan pembangunan bersama yang berkesinambungan. Dengan demikian, maka wujud *Good Governance* adalah pelaksanaan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang solid, kondusif dan bertanggung jawab dengan menjaga kesinergisan antara pemerintah, swasta, masyarakat dan *stakeholder*. Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggung jawaban yang tepat, jelas, nyata dan *legitimate*, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berlangsung secara berkesinambungan, berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

¹⁹ www.lan.go.id

4. Indikator Good Governance

a. Indikator Partisipasi

Partisipasi merupakan prinsip mendasar dari good governance, maka perlu ditetapkan indikator dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang dapat digunakan sebagai acuan bagi pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugasnya.²⁰

Tabel 1. Indikator Prinsip Partisipasi

Dimensi	No	Indikator
Partisipasi	1.	Adanya pemahaman penyelenggara negara tentang proses atau metode partisipatif.
	2.	Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan atas konsensus bersama.
	3	Meningkatnya kualitas dan kuantitas masukan (kritik dan saran) untuk pembangunan daerah.
	4	Terjadinya perubahan sikap masyarakat menjadi lebih peduli terhadap setiap langkah pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Sumber: Sedarmayanti (2009:288)

b. Indikator Efektifitas dan Efisiensi

Pada hakekatnya efektifitas kinerja digunakan untuk mengukur hasil pekerjaan yang dicapai sesuai dengan rencana guna mencapai tujuan. Nilai efektifitas ditentukan oleh tercapainya tujuan organisasi dan nilainya disesuaikan dengan tugas atau pekerjaan dari masing-masing organisasi atau lembaga. Jadi Efektifitas kinerja pada tiap-tiap organisasi akan berbeda-beda antara organisasi satu dengan organisasi yang lainnya, tergantung pada jenis dan sifat dari organisasi yang bersangkutan.

Menurut campel yang dikutip Richard M, Steers (1998:45) untuk mengukur Efektifitas kinerja ada beberapa variabel yang biasa dipergunakan yaitu

1. Kesiagaan Penilaian menyeluruh sehubungan dengan kemungkinan bahwa organisasi mampu menyelesaikan sebuah tugas khusus jika diminta.
2. Kemangkiran frekuensi kejadian-kejadian pekerja bolos dari pekerjaan pada saat jam kerja.
3. Motivasi kecenderungan seseorang individu melibatkan diri dalam kegiatan berarahkan sasaran dalam pekerjaan. Ini bukanlah perasaan senang yang relatif terhadap hasil berbagai pekerjaan sebagaimana halnya kepuasan, tetapi lebih merupakan perasaan sedia atau rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan.
4. Kepuasan kerja tingkat kesenangan yang dirasakan seseorang atas peran pekerjaannya dalam organisasi. Tingkat rasa puas individu bahwa mereka merasa dihargai karena pekerjaan mereka.
5. Beban pekerjaan beban pekerjaan yang diberikan pimpinan kepada bawahan sesuai dengan kemampuan seseorang dan sesuai dengan jumlah kelompok mereka.
6. Waktu menyelesaikan tugas. Waktu merupakan salah satu pengukuran efektivitas kerja yang sangat penting sebab dapat dilihat apakah waktu yang digunakan suatu organisasi sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh setiap anggota berorganisasi.

Tabel 2. Indikator Prinsip efektifitas dan efisiensi

Dimensi	No	Indikator	Sub Indikator
Efektivitas dan efisiensi	1.	Kesiagaan	<ul style="list-style-type: none"> • Bersedia menyelesaikan tugas khusus yang bersifat spontan
	2.	Kemangkiran	<ul style="list-style-type: none"> • Adanya pekerja yang bolos saat jam kerja • Tidak mengerjakan pekerjaan tepat waktu
	3	Motivasi	<ul style="list-style-type: none"> • adanya semangat kerja • rela bekerja untuk mencapai tujuan pekerjaan
	4	Kepuasan kerja	<ul style="list-style-type: none"> • adanya perasaan puas tentang hasil yang dicapai • adanya penghargaan untuk mencapai kepuasan kerja
	5	Beban kerja	<ul style="list-style-type: none"> • beban pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan individu • beban pekerjaan yang sesuai dengan jumlah kelompok
	6	Waktu menyelesaikan	<ul style="list-style-type: none"> • tepat waktu • sesuai target kerja

Sumber: Sedarmayanti (2009:288)

Keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan diperlukan adanya pembagian tugas yang tepat pada setiap pegawai sehingga dapat menjalankan tugas secara efektif. Indikator pengukuran efektifitas kinerja dapat dilakukan berdasarkan banyaknya tugas yang dipikul dan jumlah pegawai yang melaksanakan tugas tersebut. Dengan demikian akan adanya keseimbangan antara beban kerja dan jumlah pegawai sehingga menghasilkan efektifitas kinerja yang diharapkan.²¹

²¹ Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. PT Refika Aditama.

5. Kendala Mewujudkan Good Governance

Upaya perbaikan sistem birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hal tersebut terkait dengan tingginya kompleksitas dalam mencari solusi perbaikan. Demikian pula masih tingginya tingkat penyalahgunaan wewenang, banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), dan masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur negara merupakan cerminan kondisi kinerja birokrasi yang masih jauh dari harapan. Banyaknya permasalahan birokrasi tersebut belum sepenuhnya teratasi, baik dari sisi internal maupun eksternal (Sedarmayanti, 2009:310-311).²²

Dari sisi internal, faktor demokrasi dan desentralisasi telah membawa dampak pada proses pengambilan keputusan kebijakan publik. Dampak tersebut terkait dengan makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik, meningkatnya tuntutan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik antara lain transparansi, akuntabilitas, dan kualitas kinerja publik serta taat hukum. Secara khusus dari sisi internal birokrasi, berbagai permasalahan masih banyak yang dihadapi, antara lain pelanggaran disiplin, penyalahgunaan kewenangan, dan banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Dari sisi eksternal, faktor globalisasi dan revolusi teknologi informasi (*e-goverment*) merupakan tantangan tersendiri dalam upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, baik, dan berwibawa. Hal tersebut terkait dengan makin meningkatnya

²² Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. PT Refika Aditama.

ketidakpastian akibat perubahan faktor lingkungan politik, ekonomi, dan sosial yang terjadi dengan cepat (Sedarmayanti, 2009:310-311).²³

Tentang *Good Governance*, salah satu yang dapat dipandang cocok untuk UPT Kebersihan adalah rumusan Sudiyono (2004) tentang Prinsip *Good Governance*, yang disesuaikan dengan Dinas Kebersihan adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi

Sejauh mana proses pengambilan keputusan strategis UPT Kebersihan melibatkan secara partisipatif *stakeholders* eksternal dan internal, sehingga *stakeholders* dapat mendukungnya secara aktif.

2. Efisiensi dan Efektivitas

Seberapa besar upaya Kepala UPT Kebersihan untuk membuat lingkungan yang sehat, aman, tentram, damai dan sejahtera sesuai dengan visi dari UPT Kebersihan Kota Metro. manajemen diperlukan sebagai upaya agar kegiatan pengelolaan persampahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Terkait dengan manajemen. maka dalam penelitian ini yang ingin diketahui adalah sumber daya pengelolaan sampah yaitu sarana dan prasarana serta pembiayaan pengelolaan sampah dan salah satu rangkaian kegiatan pengelolaan sampah yaitu mekanisme pengawasan (monitoring) pengelolaan sampah oleh Dinas Pertamanan dan Kebersihan Kota Metro.

²³ Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik*. Bandung. PT Refika Aditama.

Wacana *Good Governance* sepertinya telah menjadi sebuah wacana umum yang cukup menarik untuk diadopsi dalam pencarian bentuk *Governance* yang baik untuk organisasi Dinas Kebersihan. Akan tetapi, menurut Misbahul (2012:17-19) ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan *Good Governance* ini, terutama dalam hal penerapan prinsip-prinsip atau karakteristik dasarnya, yaitu:

1. Penentuan *stakeholders*.

Inti dari proses *governance* yang baik adalah bagaimana hubungan antar *stakeholders* didalamnya. Untuk itu, maka kita terlebih dahulu perlu mendefinisikan siapa para *stakeholders* tersebut. *Stakeholder* pertama adalah UPT Kebersihan, yaitu petugas pengangkut sampah, Staf UPT Kebersihan, operator excavator, dsb. Yang kedua adalah pihak-pihak diluar organisasi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis). kelompok *stakeholders* kedua ini berarti termasuk pemerintahan sebagai yang menaungi Dinas Kebersihan Kota Metro. Masyarakat secara umum merupakan entitas yang mendasari munculnya sampah, dan pada dasarnya UPT Kebersihan untuk kebersihan lingkungan pada masyarakat, tidak hanya untuk membekali individu-individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak baginya. Penyelenggara Kebersihan pada hakikatnya harus mampu memberikan pertanggungjawaban pada seluruh *stakeholders* ini.

2. Pendefinisian peranan dan tanggung jawab masing-masing *stakeholders*.

Hal ini harus didahului dengan pembangunan kesadaran dalam diri seluruh *stakeholders* bahwa mereka memiliki kepentingan dan karenanya harus turut berpartisipasi dalam kebersihan lingkungan.

3. Partisipasi.

Partisipasi atau pelibatan aktif dari seluruh *stakeholders* merupakan sesuatu yang vital dalam penyelenggaraan *Governance* yang baik. Hal ini hanya dapat dilakukan apabila dari pihak *stakeholders* sendiri memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dan ada kesempatan atau fasilitas yang terbuka seluas mungkin untuk itu. Kesempatan dan fasilitas ini harus disediakan oleh pihak penyelenggara pemerinatahan. Partisipasi atau pelibatan ini harus terbuka dalam setiap langkah dalam proses pembangunan atau penyelenggaraan petugas kebersihan. Artinya, usaha pelibatan harus mulai dilakukan sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Selama ini, dalam praktiknya, usaha pelibatan atau kesempatan partisipasi hanya diberikan pada tahap implementasi sebuah program, sementara belum tentu seluruh *stakeholders* menyetujui program tersebut. Yang lebih parah lagi, “kesempatan” itu seringkali lebih bersifat sosialisasi program dari UPT (Unit Pelayanan Teknis) pada *stakeholders*. Seluruh *stakeholders* sudah harus mulai diberi kesempatan berpartisipasi sejak awal perencanaan program-program dan sasaran kedepan. Hal ini penting untuk menjaga komitmen seluruh *stakeholders* dan menjadi basis legitimasi program-program pembangunan.

4. Penegakkan hukum.

Pelaksanaan fungsi-fungsi UPT Kebersihan tidak mungkin dapat berjalan dengan kondusif apabila tidak ada sebuah hukum atau peraturan yang ditegakkan dalam

penyelenggaraannya. Aturan-aturan itu, berikut sanksi-sanksinya, hendaknya merupakan hasil konsensus dari *stakeholders*, untuk meningkatkan komitmen dari semua pihak untuk mematuhi, Yang perlu diperhatikan adalah aturan yang dibuat tidak dimaksudkan untuk mengekang kebebasan *stakeholders* untuk berekspresi, melainkan untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan fungsi-fungsi UPT Dinas Kebersihan dengan seoptimal mungkin.

5. Transparansi.

Transparansi atau keterbukaan merupakan sebuah prasyarat dasar untuk menunjang adanya partisipasi dan menjaga akuntabilitas pemerintahan. Proses transparansi memerlukan ketersediaan informasi yang memadai dan kemudahan bagi seluruh *stakeholders* dalam mengakses informasi tersebut. Selain itu, transparansi memungkinkan seluruh *stakeholders* untuk dapat mengawasi dan mengevaluasi kinerja pemerintahan. Dalam hal anggaran atau keuangan, transparansi ini menjadi sangat urgen, mengingat arus perputaran uang dalam institusi perguruan tinggi menjadi lebih besar dan kompleks. Akan tetapi, transparansi ini hendaknya tidak hanya dalam hal anggaran, melainkan seluruh dinamika yang terjadi dalam dinamika UPT Kebersihan.

6. Responsivitas.

Sifat responsif ini dapat kita bagi dalam dua konteks. Pertama, pihak UPT Dinas Kebersihan harus mampu menangkap isu-isu dan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam dinamika kebersihan tersebut, mereka harus mampu merespon harapan-harapan *stakeholders* dan menyikapi permasalahan yang terjadi. Yang kedua, dalam konteks yang lebih luas, UPT Kebersihan harus mampu bersikap

responsif terhadap permasalahan yang terjadi di lingkungan sekitarnya dan mampu bertindak atau berpartisipasi untuk menyikapinya. Pada dasarnya, UPT Kebersihan harus mampu meresponsif untuk menyikapi permasalahan-permasalahan di bangsa yang menaunginya dan selalu berusaha untuk memenuhi harapan-harapan dan amanat yang diembannya dari masyarakat.

7. Orientasi pada konsensus.

Proses pengambilan segala keputusan atau kebijakan dalam UPT Kebersihan hendaknya mengutamakan konsensus atau kesepakatan dari *stakeholders*.

8. Persamaan derajat dan inklusivitas.

Seluruh prinsip-prinsip tadi hanya mungkin terwujud apabila ada satu kesepahaman mengenai persamaan derajat (*equity*) setiap entitas *stakeholders*. Artinya, paradigma yang dipakai bukanlah hierarkikal atau ada satu kelompok yang derajatnya lebih tinggi dibanding kelompok lain. Sebaliknya, paradigma yang dipakai adalah persamaan derajat dan adanya pemahaman bersama bahwa perbedaan antar *stakeholders* sebenarnya terletak pada peranan, tanggung jawab, dan amanat yang diemban. Dengan begitu akan tercipta rasa saling menghargai dan menghormati antar *stakeholders*, mengingat penyelenggaraan perguruan tinggi tidak akan berjalan dengan baik apabila salah satu dari peran masing-masing *stakeholders* tidak berfungsi. Selain itu, perlu dihilangkan kesan eksklusif, agar tercipta rasa kepemilikan dan komitmen yang besar dari semua *stakeholders* dan menciptakan pola hubungan yang baik antar *stakeholders*.

9. Efektifitas dan efisiensi.

Output dari seluruh proses penyelenggaraan atau program-program yang digariskan harus tepat sasaran (efektif) atau sesuai dengan kebutuhan dan harapan *stakeholders*. Yang terutama adalah efektif dalam menunjang fungsi-fungsi pendidikan, khususnya dalam hal peningkatan mutu akademik dan riset. Selain itu, penyelenggaraan perguruan tinggi juga harus efisien dalam pemanfaatan sumber daya untuk melakukannya.

10. Akuntabilitas.

UPT Kebersihan Kota Metro harus mampu mempertanggungjawabkan seluruh rangkaian proses penyelenggaraan organisasi terhadap seluruh *stakeholders*, baik internal maupun eksternal, terutama pada masyarakat umum. Pertanggungjawaban ini dapat dilakukan secara rutin dengan jangka waktu tertentu. Misalnya, dalam hal anggaran setiap tahun perlu dilakukan proses audit, baik audit internal maupun audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik. Hasil audit maupun laporan pertanggungjawaban lain harus dengan mudah dapat diakses oleh seluruh *stakeholders*. Selain itu, untuk mendukung akuntabilitas ini, prinsip transparansi juga harus diterapkan dengan benar.

11. *Values* yang harus dijunjung tinggi UPT Kebersihan.

Seluruh prinsip ini harus dilakukan dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai dan tujuan dasar yang dianut dalam penyelenggaraan pemerintah, dan diterapkan untuk menunjang pelaksanaan fungsi-fungsi dasar organisasi tersebut. UPT Kebersihan mengemban amanat dan harapan yang besar dari masyarakat, bangsa

dan negara, sehingga penyimpangan dari nilai-nilai ini merupakan sebuah tatanan terhadap amanat dan harapan itu.²⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip diatas, secara umum ini merupakan prinsip yang harus di ikuti dalam penyelenggaraan Dinas Kebersihan apabila kita memang secara konsisten ingin menerapkan konsep *Good Governance*. Aplikasi dari prinsip-prinsip ini sebenarnya secara luas dapat ditempatkan dalam hampir semua konteks permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan TPAS Kota Metro.

B. Organisasi Publik

1. Pengertian Organisasi Publik

Organisasi adalah sistem peran, aliran aktivitas dan proses (pola hubungan kerja) dan melibatkan beberapa orang sebagai pelaksana tugas yang di desain untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi menurut Robbins (1994) adalah “entitas sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih dengan batasan yang relatif teridentifikasi, yang berfungsi secara berkelanjutan untuk mencapai seperangkat sasaran bersama”.²⁵ Selanjutnya Etzioni dalam Torang (2013:25) menyatakan bahwa “kita dilahirkan dalam organisasi, di didik oleh organisasi, dan hampir semua diantara kita menghabiskan hidup kita bekerja untuk organisasi”. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa organisasi adalah entitas

²⁴ Anwar, Misbahul. 2012. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi Yang Baik Untuk Mewujudkan Good University Governance. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

²⁵ Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udara, Arcan. Jakarta.

sosial yang dikoordinasikan secara sadar dengan batasan yang dapat diidentifikasi dan bekerja terus menerus untuk mencapai tujuan bersama.²⁶

Mills dalam Kusdi (2009:4) mendefinisikan “organisasi sebagai kolektivitas khusus manusia yang aktivitas-aktivitasnya terkoordinasi dan terkontrol untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan”. Sementara C. Argyris mendefinisikan “organisasi adalah suatu strategi besar yang diciptakan individu-individu dalam rangka mencapai berbagai tujuan yang membutuhkan usaha dari banyak orang”.²⁷

Berdasarkan definisi organisasi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah sebuah wadah atau kesatuan beberapa orang yang memiliki tujuan, struktur koordinasi, dan aturan yang ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama.

2. Ciri-Ciri Organisasi Publik

Gerloff dalam Kusdi (2009:4) menyatakan karakteristik atau ciri utama organisasi dapat diringkas sebagai 3-P, yaitu: “*Purposes, People, dan Plan*”. Sesuatu tidak disebut organisasi bila tidak memiliki tujuan, anggota, dan rencana. Dalam aspek “rencana” terkandung semua ciri lainnya, seperti sistem, struktur, desain, strategi dan proses, yang seluruhnya dirancang untuk menggerakkan semua unsur anggota (*people*) dalam memenuhi berbagai tujuan (*purposes*) yang telah ditetapkan.²⁸

Sementara Manullang (2012:59) mengemukakan bahwa ada tiga ciri dari suatu organisasi, yaitu:

²⁶ Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

²⁷ Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Salemba Humanika.

²⁸ Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Salemba Humanika.

- a. Adanya sekelompok orang.
- b. Antar hubungan terjadi dalam suatu kerja sama yang harmonis.
- c. Kerja sama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab.²⁹

3. Jenis-Jenis Organisasi

Menurut Kusdi (2009:42), jika dilihat dari aspek tujuan, produk yang dihasilkan, cara pengambilan keputusan, dan ukuran kerja, secara umum organisasi dapat dikelompokkan kedalam dua tipe atau jenis, yakni:

- a. Organisasi publik, yaitu organisasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, tidak pada laba (*non profit oriented*)
- b. Organisasi bisnis, yaitu organisasi yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*)³⁰

Wursanto dalam Sallya (2014:23) mengatakan, jika dilihat dari berbagai segi, organisasi terdiri dari beberapa macam, yaitu:

1. Organisasi Dari Segi Jumlah Pucuk Pimpinan

Dari segi jumlah pucuk pimpinan, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi tunggal (*single organization*) dan organisasi jamak (*plural organization* atau *plural executive organization*), yaitu:

- a. Organisasi Tunggal

²⁹ Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajem*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.

³⁰ Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Salemba Humanika.

Organisasi ini merupakan organisasi yang memiliki pucuk pimpinan di tangan satu orang. Nama pimpinan yang digunakan tergantung dari jenis kegiatan organisasi, misalnya manajer.

b. Organisasi Jamak

Pucuk pimpinan organisasi jamak berada di tangan beberapa orang. Beberapa orang pimpinan tersebut merupakan satu kesatuan. Nama dari kesatuan pimpinan tersebut tergantung dari jenis dan fungsi organisasi atau lembaga tersebut, misalnya Majelis, Direksi.

2. Organisasi Dari Segi Keresmian

Menurut keresmiannya organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal (*formal organization*) dan organisasi informal (*informal organization*).

a. Organisasi Formal

Dikatakan organisasi formal apabila kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang yang tergabung dalam suatu kelompok secara sadar dikoordinasikan guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, sehingga orang-orang yang tergabung dalam kelompok itu mempunyai struktur yang jelas.

b. Organisasi Informal

Organisasi informal adalah organisasi yang disusun secara bebas dan spontan, dan keanggotaannya diperoleh secara sadar atau secara tidak sadar, di mana kapan seseorang menjadi anggota sulit ditemukan. Tujuan organisasi informal juga tidak dirinci secara tegas, dan biasanya organisasi ini bersifat sementara karena pembentukannya tidak didasarkan atas rencana yang matang dan jelas.

3. Organisasi Dari Segi Tujuan

Dari segi tujuan yang hendak dicapai, organisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi niaga atau organisasi ekonomi, dan organisasi sosial atau organisasi kemasyarakatan.

a. Organisasi Niaga atau Organisasi Ekonomi

Organisasi ini memiliki tujuan utama yaitu mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Kegiatan yang dilakukan organisasi ini adalah memproduksi dan mendistribusikan barang dan jasa.

b. Organisasi Sosial atau Organisasi Kemasyarakatan

Yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi kemasyarakatan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1985 menjelaskan bahwa organisasi kemasyarakatan merupakan organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.³¹

³¹ Sallya, Rizka. 2014. *Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Provinsi Lampung. Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

4. Pengertian Sampah

Pengertian sampah adalah suatu yang tidak dikehendaki lagi oleh yang punya dan bersifat padat. Sementara didalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat atau semi padat berupa zat organik atau anorganik bersifat dapat terurai atau tidak dapat terurai yang dianggap sudah tidak berguna lagi dan dibuang kelingkungan, (Slamet, 2002:15).

Kodoatie (2003:312) mendefinisikan sampah adalah limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan perkotaan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Sampah dalam ilmu kesehatan lingkungan (*refuse*) sebenarnya hanya sebagian dari benda atau hal-hal yang dipandang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi atau harus dibuang, sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kelangsungan hidup. Menurut SK SNI T-13-1990 F, yang dimaksud dengan sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari zat organik dan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi bangunan. Sampah perkotaan adalah sampah yang timbul di kota dan tidak termasuk sampah bahan berbahaya dan beracun (B3). Hadiwiyoto (1983:12), mendefinisikan sampah adalah sisa-sisa bahan yang mengalami perlakuan-perlakuan baik karena telah diambil bagian utamanya atau karena pengolahan atau karena sudah sudah tidak ada manfaatnya yang ditinjau dari segi ekonomis tidak ada harganya dan dari segi lingkungan dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau gangguan kelestarian. Berdasarkan beberapa pengertian tentang sampah seperti di atas maka dapat didefinisikan

sampah adalah sisa bahan, limbah atau buangan yang bersifat padat, setengah padat yang merupakan hasil sampingan dari kegiatan atau siklus kehidupan manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.

Menurut Hadiwiyoto (1983:24), berdasarkan lokasinya, sampah dapat diklasifikasikan menjadi 2 yaitu:

1. Sampah kota (urban) yaitu sampah yang terkumpul di kota-kota besar.
2. Sampah daerah, yaitu sampah yang terkumpul di daerah-daerah di luar perkotaan, misalnya di desa, di daerah permukiman dan di pantai.

G.R. Terry (1978) menyebutkan bahwa perencanaan adalah kegiatan memilih dan menghubungkan fakta dan menggunakan sejumlah asumsi mengenai masa datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Louis A. Allen (1975) mendefinisikan perencanaan dengan menentukan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dari kedua definisi perencanaan ini dapat dipahami bahwa perencanaan merupakan pekerjaan mental untuk memilih sasaran, kebijakan, prosedur dan program yang diperlukan untuk mencapai apa yang diinginkan pada masa yang akan datang.

Keberadaan perencanaan dalam suatu organisasi termasuk UPT Dinas Kebersihan Kota Metro sangat penting, karena melalui perencanaan akan dapat ditentukan tujuan, kebijakan, prosedur, program serta dapat memberikan cara atau pedoman pelaksanaan yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Perencanaan yang baik akan melahirkan tindakan ekonomis dan menghindari dari pemborosan

pemanfaatan sumberdaya organisasi, sehingga semua potensi organisasi memiliki arah yang sama dalam mencapai tujuan organisasi.

Perencanaan akan memperkecil resiko yang dihadapi organisasi pada masa yang akan datang, karena melalui perencanaan kegiatan organisasi akan tergambar secara lengkap, jelas dan menyeluruh, sehingga seluruh kegiatan organisasi dapat dilakukan secara teratur. Dengan demikian kegiatan organisasi dapat dilakukan pengukuran, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan *mismanagement* penempatan staf. Perencanaan akan membantu dan menentukan peningkatan daya guna dan hasil guna organisasi.

Perencanaan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro di Bidang kebersihan atau persampahan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, UPT Kebersihan menyelenggarakan fungsi 1. Perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, pengevaluasian dan pelaporan seluruh pelaksanaan tugas bidang kebersihan kota, 2. Pengaturan dan pembangunan serta pengelolaan kebersihan, 3. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kebersihan dan keindahan, 4. Penyusunan rencana kerja, pelaksanaan pedoman dan petunjuk pengawasan kebersihan, 5. Pelaksanaan penanggulangan kebersihan/persampahan, 6. pemungutan, pengadministrasian dan pelaporan retribusi kebersihan/persampahan dan penyediaan penyedotan kakus, 7. Pengaturan penggunaan peralatan kebersihan Pemberian penyuluhan/penerangan kepada masyarakat tentang kebersihan dan keindahan kota di lingkungannya masing-masing, 8. Pelaksanaan pembinaan dan partisipasi pedagang, masyarakat dan pengunjung fasilitas umum/ sosial terhadap kebersihan kota, 9. Penyusunan rencana kebutuhan, pelaksanaan pengadaan sarana prasarana, pendistribusian serta pengadaan perlengkapan peralatan kerja petugas kebersihan, 10. Pendataan,

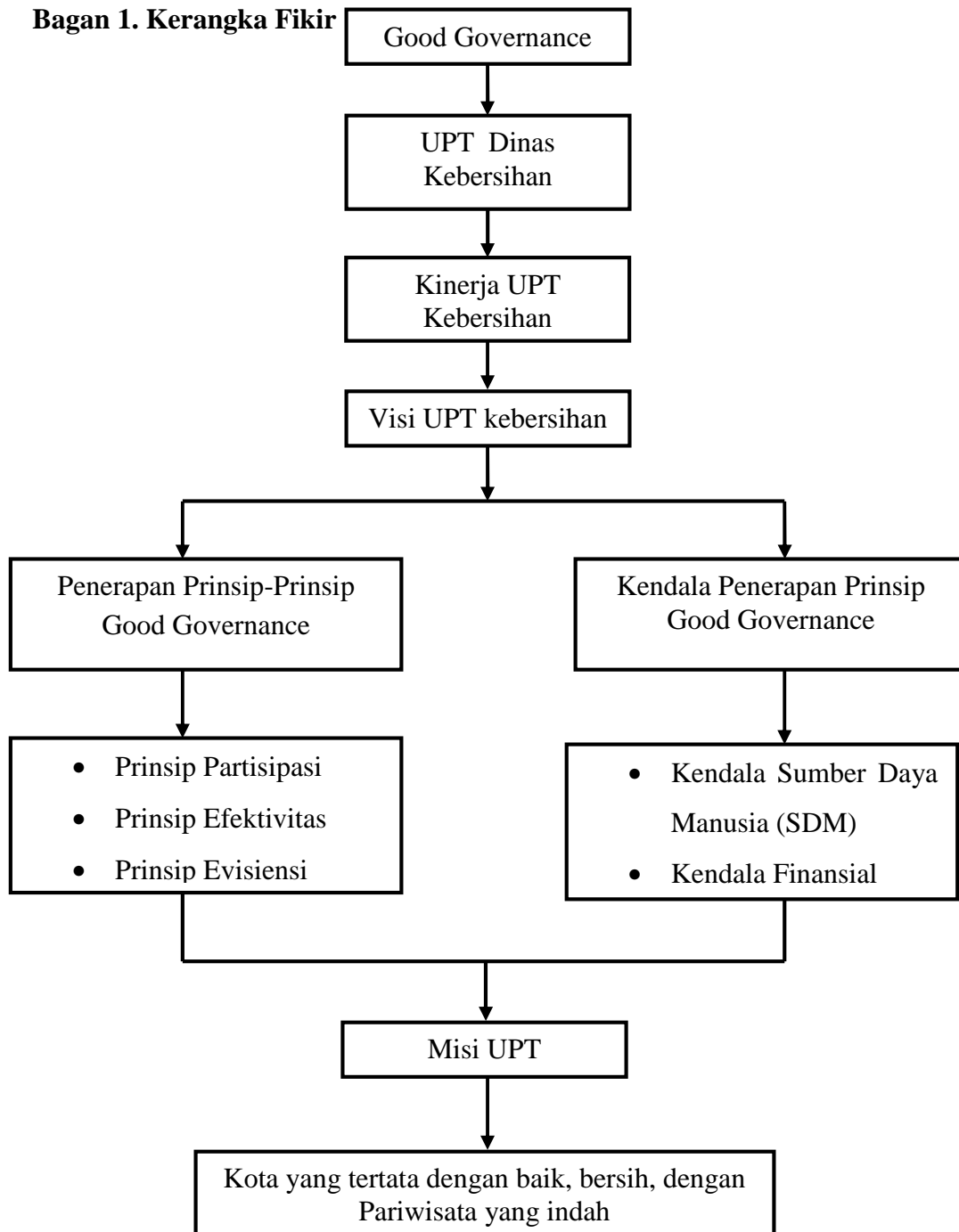
pengendalian, pembinaan dan bimbingan serta pembagian tugas wilayah kerja kepada petugas operasional kebersihan, 11. Pelaksanaan inventarisasi kubikasi sampah pada tempat penampungan dan mencari lokasi pembuangan akhir, 12. Pengaturan penyelenggaraan operasional pengangkutan sampah ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir Sampah (TPAS), 13. Penyediaan sarana dan prasarana penampungan dan pengangkutan, pengumpulan dan pengangkutan sampah dari tempat pembuangan sementara ke tempat pembuangan akhir dan penampungan, 14. Pengendalian, pemusnahan dan pemanfaatan sampah pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), 15. Pemeliharaan peralatan operasional, sarana dan prasarana pada Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), 16. Penyusunan rencana pendapatan, operasional pengurusan sampah, pembinaan petugas dan penggunaan peralatan yang ada di Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS), 17. Pelaksanaan pengurusan sampah sampai pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna, 18. Pengelolaan administrasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kebersihan, 19. Penginventarisasian dan mengevaluasi serta melaporkan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan operasional UPT, 20. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, 21. Penyelenggaraan tata usaha UPT³².

³² <http://info.metrokota.go.id/dinas-tata-kota-dan-pariwisata/>

F. Kerangka Fikir

Guna mempermudah penulis dalam melaksanakan penelitian, maka diperlukan acuan dalam suatu penelitian. Acuan penelitian tersebut dituangkan dalam kerangka fikir sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Fikir



Sumber: Diolah oleh peneliti (Agustus 2016).

Keterangan:

Menurut Tresiana (2013:75), “kerangka pikir dalam penelitian kualitatif adalah penguasaan hasil tangkapan peneliti atas fenomena sosial yang diamati, telaah konseptual, rumusan masalah, tujuan, kegunaan, metode yang dipilih, hipotesis (asumsi) yang dibangun. Alur keterkaitan unsur-unsur itu dan pengemukaan konsep, model dan teori sebagai pisau analisis biasanya dalam bentuk diagram (skema diagramatis)”.³³ Untuk lebih jelas maka kerangka pikir penelitian ini diaplikasikan melalui gambar diatas dengan penjelasan dibawah ini.

Di era globalisasi saat ini, untuk mewujudkan pemerintahan yang baik menjadi suatu hal yang tidak dapat ditawar lagi keberadaannya dan mutlak terpenuhi. Penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dalam pengelolaan pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama oleh karena masyarakat mulai kritis dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas pelayanan dari instansi pemerintah.

Good Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi menekankan pada pelaksanaan fungsi pemerintahan secara bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan pihak swasta. *Good Governance* juga berarti implementasi kebijakan sosial-politik untuk kemaslahatan rakyat banyak, bukan hanya untuk kemakmuran orang-perorang atau kelompok tertentu.

³³ Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Lampung. Penerbit Lembaga Penelitian.

Seiring perkembangan waktu, konsep ini turut di implikasikan. Konsep ini tetap mengadopsi prinsip-prinsip atau karakteristik dasar dari *Good Governance*, yaitu prinsip partisipasi, orientasi pada konsensus, akuntabilitas, transparansi, responsif, efektif dan efisien, ekuiti (persamaan derajat) dan inklusifitas, dan penegakan/supremasi hukum. Yang berbeda adalah nilai dan tujuan yang menjiwainya.

Dalam pemahaman ini, *Good Governance* bukan semata-mata mencakup relasi dalam pengelolaan pariwisata saja, melainkan juga mencakup relasi sinergis dan sejajar antara pemerintah, Dinas kebersihan, dan masyarakat. Gagasan kesejajaran ini mengandung arti akan pentingnya redefinisi peran dan hubungan ketiga unsur ini dalam mengelola sumberdaya yang tersedia. Dari aplikasi ini akan muncul hubungan yang sinergis antara ketiga unsur sehingga terwujud pengelolaan kota yang tertata dengan baik, tertib, teratur, bersih, dengan pariwisata yang indah dan nyaman.

Untuk itu, *Good Governance* juga turut diterapkan pada UPT Kebersihan. Karena sesuai dengan Visi Dinas Pariwisata Kota Metro, yaitu Kota Metro sebagai Kota yang tertata dengan baik, tertib, teratur, bersih, dengan pariwisata yang indah dan nyaman.

Dinas Pariwisata mempunyai misi meningkatkan sumberdaya manusia, meningkatkan peningkatan kota, meningkatkan fasilitas umum dan fasilitas sosial, menciptakan Perkotaan yang berwawasan lingkungan, meningkatkan kawasan wisata yang indah dan nyaman. Dinas Tata Kota dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan sebagai urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan

tugas pembantuan di bidang Tata Kota, Pariwisata, Persampahan, Energi dan Sumber Daya Mineral³⁴

2.3 PENGOLAHAN

Menurut SK SNI T-133-1990-F, pengolahan sampah adalah suatu upaya untuk mengurangi volume sampah dari lokasi pemindahan atau langsung dari sumber sampah menuju ke tempat pembuangan akhir. Teknik-teknik pengolahan sampah dapat berupa :pengomposan, pembakaran, daur ulang dan pemadatan.

Pengelolaan sampah di Indonesia yang berupa pengumpulan pengangkutan-pembuangan (P3) mulai bergeser ke Pemilahan-Pengolahan-Pemanfaatan-Pembuangan residu (P4). Sebagaimana diundangkannya UURI No 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah. Selain itu dalam rencana nasional sanitasi lingkungan berbasis masyarakat juga telah dicantumkan bahwa penanganan sampah memerlukan upaya mulai dari partisipasi masyarakat hingga pemerintah. Pengolahan sampah menjadi sangat penting karena sangat berpengaruh pada biaya pengolahan. Sampah yang tercampur akan membutuhkan biaya pengolahan yang lebih mahal. Oleh karena itu kunci dari pengelolaan sampah adalah pemilahan, atau pemisahan antara jenis sampah yang satu dengan jenis sampah yang lain. Dimana dalam proses pengelolaannya masyarakat berperan dalam pengelolaan dan memanfaatkan sampah organik dan sampah anorganik.

³⁴ Info. Metrokota.go.id

Masalah lain yang timbul akibat pengelolaan TPA yang tidak teratur persyaratan diantaranya adalah timbulnya bau, menurunnya kualitas air akibat pembuangan sampah ke sungai, merembesnya air lindi dari TPA ke air tanah dangkal dan air permukaan, pencemaran udara serta merebaknya dioxin yang bersifat karsinogen (Anonimous 2009)

III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dikarenakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga memudahkan penulis untuk mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami hasil dari penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro. Tujuan penelitian melalui pendekatan kualitatif ini adalah bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara holistik dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata, bahasa pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode yang alamiah.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif terbatas pada usaha mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga bersifat mengungkapkan fakta dan memberikan gambaran secara obyektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Oleh karena itu penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memberi penilaian atau taksiran terhadap penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro.

B. Fokus Penelitian

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan fokus, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum. Dalam mempertajam penelitian, peneliti kualitatif menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2008:286) menyatakan bahwa "*A facused refer to a single cultural domain or a few related domains*" maksudnya adalah bahwa, fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial.³⁵

Fokus yang sebenarnya dalam penelitian kualitatif diperoleh setelah peneliti melakukan *grand tour observation* atau *grand tour question* atau yang disebut dengan penjelajahan umum. Dari penjelajahan umum ini peneliti akan memperoleh gambaran umum menyeluruh yang masih pada tahap permukaan tentang situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Maka dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Kinerja dari Pengelolaan sampah di TPAS Kota Metro dan hasilnya
2. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro
 - a. Prinsip Partisipasi
 - b. Prinsip Efektivitas
 - c. Prinsip Efisiensi
3. Kendala penerapan *Good Governance* UPT Kebersihan Kota Metro
 - a. Kendala Sumber Daya Manusia
 - b. Kendala Finansial

³⁵ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta

Dalam focus penelitian ini, penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro dapat dikaji melalui karakteristik atau prinsip-prinsip dasar dari konsep *Good Governance*. Terdapat beberapa prinsip dasar yang diantaranya adalah partisipasi (*participation*), penegakan focus (*rule of law*), transparansi (*transparantion*), responsifitas (*responsiviness*), orientasi kesepakatan (*consensus orientation*), kesetaraan (*equity*), efektivitas (*effectiveness*) dan efisiensi (*efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*). Namun pada penelitian ini, peneliti hanya membatasi pada prinsip a) partisipasi, b) efektivitas, dan c) efisiensi

Pada prinsip Partisipasi, peneliti ingin mengetahui keterlibatan aktif masyarakat dengan pemerintah melalui UPT Kebersihan Kota Metro dalam hal pengelolaan sampah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah merupakan kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya program pengembangan pengelolaan sampah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan diri sendiri. Tanpa adanya peran serta masyarakat semua program pengelolaan persampahan yang direncanakan akan sia-sia. Salah satu pendekatan masyarakat untuk dapat membantu program pemerintah dalam keberhasilan adalah membiasakan masyarakat pada tingkah laku yang sesuai dengan program persampahan yaitu merubah persepsi masyarakat terhadap pengelolaan sampah yang tertib, lancar dan merata, merubah kebiasaan masyarakat dalam pengelolaan sampah yang kurang baik dan faktor-faktor sosial, struktur dan budaya setempat (Wibowo dan Djajawinata, 2004 : 38).

Menurut (Hadi, 1995:75) dari segi kualitas, partisipasi atau peran serta masyarakat penting sebagai ³⁶:

- Input atau masukan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan.
- Strategi untuk memperoleh dukungan dari masyarakat sehingga kredibilitas dalam mengambil suatu keputusan akan lebih baik.
- Komunikasi bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menampung pendapat, aspirasi dan concern masyarakat.
- Media pemecahan masalah untuk mengurangi ketegangan dan memecahkan konflik untuk memperoleh konsensus.

Pada prinsip Efektivitas, peneliti ingin mengetahui sejauh mana suatu organisasi merealisasikan tujuannya, semua konsep tersebut hanya menunjukkan pada pencapaian tujuan organisasi.

Kemudian yang terakhir, pada prinsip Efisiensi, peneliti ingin mengetahui sejauh mana UPT kebersihan Kota Metro dalam penggunaan sumberdaya. Seberapa besar upaya kepala UPT Kebersihan untuk membuat lingkungan yang sehat, aman, tentram, damai dan sejahtera sesuai dengan visi dari UPT Kebersihan Kota Metro.

³⁶ Hadi, S.P. 2005. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

C. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini perlu dikemukakan lokasi dan tempat dimana penelitian ini dilakukan. Lokasi penelitian yaitu di Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro, khususnya di UPT Kebersihan Kota Metro. Alasan peneliti mengambil lokasi ini adalah karena Kota Metro sebagai mana dengan kota lainnya memiliki permasalahan kota yang focus ve sama walaupun intensitasnya berbeda seperti permasalahan dalam kota/lingkungan sanitasi, persampahan, drainase, air bersih, pertumbuhan kota yang tidak terkendali, serta berbenturan berbagai kepentingan dengan masyarakat yang menimbulkan kesemerautan, pencemaran dan permasalahan-permasalahan lainnya. Penelitian ini bertempat di Tepat Pembuangan Akhir Sapah di Kelurahan Karangrejo Metro Utara. Dengan demikian peneliti dapat melihat dan menganalisis bagaimana kinerja pengolahan sampah yang ada di Kota Metro tahun 2015.

D. Instrumen Penelitian

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Instrumen dalam penelitian kualitatif dapat berupa pedoman dokumen, pedoman wawancara, pedoman observasi (Sugiyono, 2008).³⁷

³⁷ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Selain menggunakan pedoman wawancara, kamera digital, recorder handphone, pedoman observasi dan dokumen, instrumen pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Alasan mengapa peneliti menjadi instrumen penelitian karena peneliti di dalam penelitian kualitatif adalah alat yang dituntut untuk objektif terhadap fokus penelitian yang ada di lapangan dan bagaimana peneliti itu sendiri sehingga temuan-temuan di dalam penelitian ini nantinya mampu menghasilkan kesimpulan yang objektif.

E. Informan dan Teknik Penarikan Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung dengan masalah penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih akurat. Menurut Tresiana dalam bukunya *Metode Penelitian Kualitatif*, penentuan informan kunci (*key informant*) atau sampel (*representative sample*), ditentukan oleh 2 hal pokok yaitu:

1. *Good informant*, dalam artian informan itu dengan penuh keikhlasan, senang hati, terbuka dan jujur dalam memberikan informasi data yang diperlukan peneliti.
2. Informan itu benar-benar terlibat artinya bahwa informan mengetahui, melihat, mendengar, merasakan, dan berbuat serta memahami informasi yang berkaitan dengan substansi penelitian atau informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Nama dan Peran Informan

No	Nama	Peran/Jabatan
1	Ir. Purwanto	Kepala Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
2	I Yoman Suarsana, SH	Sekretaris Dinas Tata Kota dan Pariwisata Kota Metro
3	Supriyanto, S.Si	Ka. UPT Kebersihan Kota Metro
4	Andi Murtan	Kabid Penataan Kebersihan Kota Metro
5	Santoso, S.IP	Oprasional Kebersihan Kota Metro
6	Sahril, S.IP	Koordinator UPT Kebersihan Kota Metro
7	Sugiono	Kabag BLH Kota Metro
8	Yerry	Sekretaris BLH Kota Metro
9	Iskandar	Kabid Pengembangan Kapasitas Kota Metro
10	Syahrul	Staf Bidang Penataan Kebersihan Kota Metro
11	Muh. Zain	Staf Dinas Kebersihan Kota Metro
12	Buyung	Staf Bidang Pengembangan Kapasitas Kebersihan Kota Metro
13	Tia Saras Wati	Staf Bidang Pengembangan Kebersihan Kota Metro
14	Ibu siti	Ibu Rumah tangga (Masyarakat Kota Metro)
15	Ibu Sulfiani	Warga Masyarakat Kota Metro

16	Ibu Ana Septiana	Pimpinan Ibu-ibu Muslimat Ranting Kec. Metro Timur
17	Ibu Rosmala Dewi	Ketua PKK Desa Sumbersari Kec. Metro Selatan
18	Etty Maryati	Ketua Wanita Tani Kec. Metro Pusat
19	Sarino	Penjaga TPAS Karang rejo Kec. Metro Timur Kota Metro
20	Faturohman	Operator alat berat di TPAS Kota Metro
21	Jumio	Pemulung di TPAS Karangrejo Metro Timur
22	Ade Soadah	Staf di Dinas Kebersihan Kota Metro

Sumber: Diolah oleh peneliti (juli, 2016).

Dari keterangan diatas maka jumlah total dari informan dalam penelitian ini berjumlah 22 (dua puluh dua) orang. Peneliti memilih informan diatas adalah, yang pertama adalah Informan dari UPT Kebersihan dan jajarannya karena menganggap bahwa informan ini penting dan memiliki pengetahuan yang lebih sebagai pelaksana organisasi yang menjalankan organisasi di Dinas Kebersihan Kota Metro, informan ini memiliki keterkaitan erat dalam proses penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro yang mana pihak ini bertanggung jawab dalam beberapa mekanisme yang harus dijalankan demi mencapai kebersihan di Kota Metro. Peneliti juga memilih pihak-pihak masyarakat umum dan pemulung karena informan ini merupakan salah satu unsur pelaksana penerapan kebersihan di Kota Metro.

F. Teknik Pengumpulan data

Pada bagian ini dikemukakan bahwa dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi. Perlu dikemukakan jika teknik pengumpulan datanya dengan observasi, maka apa yang diobservasi, jika wawancara, kepada siapa akan melakukan wawancara (Burhan, 2011:24).³⁸ Penelitian kualitatif biasanya langsung dilaksanakan pada fenomena sosial atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah penelitian ini benar-benar mengandalkan informasi atau data langsung dari para informan yang terlibat. Dengan demikian prosedur utama dalam penelitian ini adalah observasi khususnya observasi partisipatif yang melibatkan informan dan wawancara yang keduanya dapat dikatakan wajib atau suatu keharusan dengan tidak menyingkirkan dokumen-dokumen atau kepustakaan (Sugiyono, 2008).³⁹

Dalam penelitian ini juga peneliti merencanakan menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu sebagai berikut:

a. Observasi (Pengamatan)

Dalam Sugiyono (2008), pengamatan dikenal tiga jenis metode yaitu yang pertama pengamatan biasa, kedua pengamatan terkendali dan pengamatan partisipatif/terlibat.

³⁸ Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Kencana.

³⁹ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

Dalam observasi ini, peneliti mengamati berdasarkan data dan dokumen yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk mengamati hal-hal yang berkaitan dengan data yang relevan dengan fokus penelitian yakni tentang penerapan *Good Governance* dengan prinsip partisipasi, prinsip efektivitas dan prinsip efisiensi. Kemudian peneliti juga melakukan observasi demi mengetahui faktor-faktor penghambat penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Di dalam organisasi UPT Kebersihan Kota Metro. Selain itu, peneliti juga mengamati fasilitas sarana prasarana yang dipakai, dan pegawai yang melakukan pelayanan dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro.

b. Metode Wawancara

Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam (*in-depth interview*) adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya-jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama (Burhan, 2008).⁴⁰

⁴⁰ Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.

Melihat penjelasan diatas maka kita dapat memasuki dunia pikiran dan perasaan informan. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan pribadi.

Seperti yang dikemukakan Hadi dalam Sugiyono (2003) bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview; pertama, bahwa subjek (responden/informan) adalah yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Kedua, bahwa apa yang dinyatakan oleh subjek kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Ketiga, bahwa interpretasi subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksudkan oleh peneliti. Dalam wawancara kita dihadapkan kepada dua hal, pertama kita harus secara nyata berhadapan atau berinteraksi dengan informan sedangkan yang kedua kita menghadapi kenyataan, yakni adanya pandangan orang lain yang mungkin berbeda dengan pandangan kita sendiri.⁴¹

Kemudian juga didalam wawancara, menurut Patton dalam Sugiyono (2005) terdapat 4 (empat) bentuk teknik wawancara yang biasa digunakan sebagai berikut: *Pertama*, wawancara informal (*informal interview*) merupakan cara wawancara yang dicirikan tidak terstrukturanya

⁴¹ Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

wawancara dan proses wawancaranya dapat terjadi secara tidak sengaja. Kemudian yang *kedua*, wawancara tidak terstruktur (*instructured interview*) merupakan proses wawancara yang direncanakan. Dengan mewawancarai informan, namun dalam pelaksanaannya tidak terlalu diatur atau dikontrol isu yang akan ditanyakan disiapkan terlebih dahulu. Teknik yang *ketiga*, yakni wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*), merupakan wawancara yang dilakukan dengan isu yang disiapkan dan dalam prosesnya bersifat agak mengatur jalannya wawancara. Di dalam wawancara ini digunakan pedoman wawancara yang perlu ditanyakan secara sistematis. *Keempat*, wawancara terstruktur (*structured interview*) merupakan wawancara yang dilakukan terstruktur dengan menggunakan daftar pertanyaan dan penjadualan (*schedule*).⁴² Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti berencana menggunakan bentuk wawancara semi terstruktur maupun wawancara terstruktur, karena peneliti beranggapan teknik ini cukup tepat untuk membantu peneliti dalam mencari data-data yang akan membantu proses hasil penelitian.

c. Metode Dokumentasi dan Materi Audio Visual

Di dalam penelitian kualitatif seorang peneliti lebih sering data-data tersebut diperoleh dari sumber manusia, melalui observasi dan wawancara. Akan tetapi data-data juga dapat di ambil dari data dokumentasi, foto dan bahan statistik yang ada di TPAS Kota Metro. Ada beberapa keuntungan dari dokumentasi antara lain bahwa bahan itu

⁴² Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.

telah ada telah tersedia dan siap pakai tinggal bagaimana si peneliti mempelajarinya dan menganalisisnya dengan cermat agar dapat berguna bagi penelitian yang sedang dilaksanakan. Sedangkan audio visual dapat berupa data-data terkait di TPAS kota Metro.

G. Teknik Analisis Data

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian, maka analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, dan makna dari data yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan-pernyataan, tafsiran-tafsiran setelah menggali data dari beberapa orang informan kunci yang ditabulasikan dan dipresentasikan sesuai dengan hasil temuan (observasi) dan wawancara mendalam antara peneliti dengan para informan.

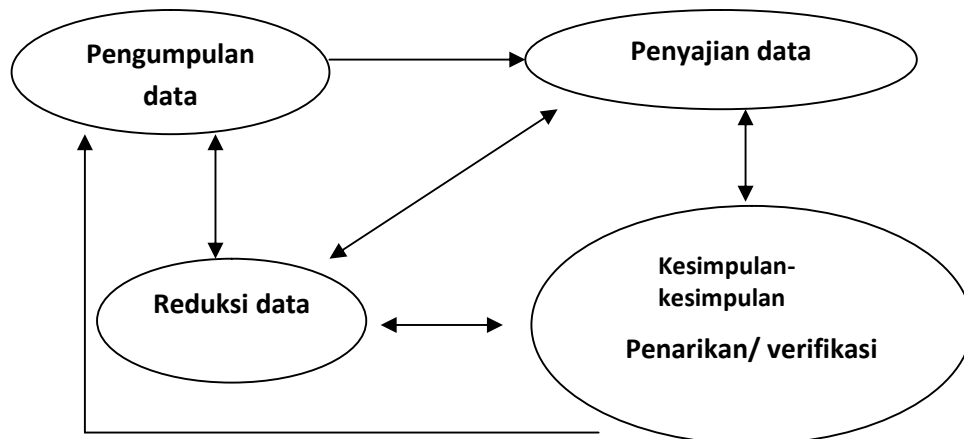
Hasil pengumpulan data tersebut diolah secara manual dan direduksi, selanjutnya hasil reduksi tersebut dikelompokkan dalam bentuk segmen tertentu (*display data*) dan kemudian disajikan dalam bentuk kontent analisis dengan penjelasan-penjelasan, selanjutnya diberi kesimpulan, sehingga dapat menjawab rumusan masalah, menjelaskan dan terfokus pada representasi terhadap fenomena yang hadir dalam penelitian (Sugiyono, 2008).⁴³

Miles dan Huberman (1992) juga mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus

⁴³ Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data dapat dilihat dari model komponen dalam analisis data seperti⁴⁴:

Bagan 2. Analisis Data Model Interaktif



Sumber: Tresiana (2013:119)

Analisis dalam penelitian kualitatif merupakan suatu proses kegiatan yang berjalan secara *continue*, berkesinambungan dan interaktif. Adapun tahapan-tahapan data yang akan peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengumpulan Data

Merupakan semua kegiatan yang dilakukan untuk mengumpulkan data atau informasi baik dari informan yakni Kepala UPT Kebersihan di Kota Metro, masyarakat pengumpul sampah, petugas kebersihan atau pasukan kuning, petugas sosialisasi yang sudah ditetapkan menjadi informan. Data-data dokumentasi yang berbentuk dokumen-dokumen baik berupa informasi mengenai TPAS di Kota Metro maupun data-data mengenai

⁴⁴ Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Lampung. Penerbit Lembaga Penelitian.

objek penelitian . Observasi maupun audio visual baik lokal maupun nasional guna melengkapi data-data yang dibutuhkan bagi jalannya penelitian ini. Pengumpulan data juga peneliti lakukan sejak prasurvey pada UPT Kebersihan tepatnya di TPAS di Kota Metro sampai pada selesainya proses penelitian.

2. Tahap Reduksi Data

Tahap reduksi data adalah proses memilah atau memilih atau juga pemilihan, focusing biasanya juga disebut dengan penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang di dapat dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Data tersebut tentu juga bukan semua data yang didapat untuk bisa dimanfaatkan dalam penelitian ini, akan tetapi proses ini peneliti benar-benar harus membuang data yang dirasa tidak penting dan memakai data yang dirasa terpercaya serta pantas dikelompokkan ke dalam file data hasil penelitian peneliti pada penelitian analisis kinerja pengolahan sampah di TPAS Kota Metro.

3. Tahap Penyajian Data.

Kegiatan penyajian data atau informasi yang didapat dari hasil penelitian di UPT Dinas Kebersihan Kota Metro akan dibuat dalam bentuk yang terstruktur dengan baik sehingga kegiatan pembuat kesimpulan dalam bentuk narasi, foto, gambar, dan tabel atas kategori tertentu padangan atau pemikiran informan dapat dilakukan.

Dalam hal ini, peneliti melakukan penyajian data yang peneliti masukan pada hasil penelitian yang mana untuk fokus, target dan sasaran penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* ini peneliti menyajikan hasil wawancara dari informan, menyimpulkan, memasukan tabel data laporan yang telah terdata, dan data yang telah terekam dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro. Untuk fokus penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro dari setiap indikator peneliti melakukan penulisan hasil wawancara, kemudian menyimpulkan hasil wawancara per-indikator, kemudian memasukan foto maupun data yang terkait pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Governance*, dan juga gambar foto sarana dan prasarana di UPT Kebersihan Kota Metro.

4. Tahap Verifikasi Data

Dalam penelitian penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro, ini merupakan kegiatan membuat kesimpulan dalam bentuk narasi atas kategori dan atau pola tertentu menurut pandangan informan itu sendiri. Dalam tahap ini peneliti telah melakukan kegiatan penulisan dalam pembahasan untuk menarik kesimpulan dalam penelitian penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* Wilayah Kota Metro dalam mewujudkan visi Kota Metro sebagai Kota yang tertata dengan baik, tertib, teratur, bersih dengan Pariwisata yang indah dan nyaman.

H. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan padanan dari konsep kesahihan (validitas) dan eandalan (reliabilitas) menurut versi penelitian kualitatif dan disesuaikan dengan tuntutan pengetahuan, kriteria dan paradigmanya sendiri. Untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan. Pelaksanaan teknik pemeriksaan didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu: 1) derajat kepercayaan (credibility), 2) keteralihan (transferbility), 3) kebergantungan (dependability) dan 4) kepastian (confrimability).

Adapun teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian analisis kinerja pengolahan sampah di TPAS Kota Metro adalah sebagai berikut:

1. Kredibilitas/Derajat Kepercayaan

Untuk memastikan apakah data yang dikumpulkan itu kredibel, maka ada beberapa teknik yang dapat dipergunakan. Moleong (2005) mengemukakan ada beberapa teknik yang dipakai untuk menguji kredibilitas suatu studi dalam penelitian kualitatif yaitu teknik pemeriksaan data tersebut terdiri dari:

a) Ketekunan pengamatan

Peneliti akan melakukan ketekunan pengamatan dalam penelitian ini. Pengamatan merupakan hal penting yang harus dilakukan karena pengamatan atau observasi mampu menjadi pelengkap dalam memberikan jawaban penelitian Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di Kota Metro tahun 2015. Ketekunan pengamatan bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur dalam situasi yang sangat relevan

dalam penelitian Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di TPAS Kota Metro dengan persoalan atau isu yang sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci.

b) Triangulasi data

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Denzim dalam (Lexy J. Maleong, 2002), membedakan empat macam triangulasi dengan teori, menurut Licoln dan Guba dalam (Lexy J. Maleong, 2002) berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan sesuatu atau lebih teori. Triangulasi data merupakan salah satu cara dalam penelitian kualitatif yang berjudul Analisis Kinerja Pengolahan Sampah di TPAS Kota Metro untuk menganalisis dan memperkuat data yang didapat baik data dari wawancara, observasi maupun dengan data teori yang dipakai. Dengan menggunakan cara triangulasi data diharapkan hasil penelitian ini nantinya mampu disajikan secara terpercaya.

c) Kecukupan referensi

Referensi merupakan data yang harus peneliti siapkan bahkan sebelum peneliti turun lapang karena referensi ini membantu untuk membuat apakah penelitian ini layak untuk diteliti atau tidak. Referensi yang di gunakan peneliti adalah buku-buku yang berkaitan dengan tema

penelitian, dokumen-dokumen Dinas kebersihan yang berkaitan dengan data-data yang diperlukan, Undang-undang yang mendukung seperti Undang-undang tentang pengelolaan sampah, pedoman maupun peraturan – peraturan yang berkenaan dengan pengolahan sampah dan kebersihan lingkungan.

2. Transferabilitas/Keteralihan

Usaha membangun keteralihan dalam membangun penelitian kualitatif jelas sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif dengan validitas eksternalnya. Teknik ini menuntut peneliti agar melaporkan hasil penelitiannya sehingga uraiannya itu dilakukan seteliti mungkin yang menggambarkan konteks tempat penelitian pada TPAS Kota Metro. Uraiannya harus mengungkapkan secara khusus sekali segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembaca agar peneliti dapat memahami penemuan-penemuan yang diperoleh nanti di lapangan.

3. Dependabilitas/Kebergantungan

Untuk menyakinkan bahwa hasil penelitian yang dilakukan itu realibel, maka dilakukan dengan cara auditing kebergantungan. Hal ini dilakukan baik terhadap proses maupun terhadap hasil atau keluaran dalam pemeriksaan terhadap kriteria kebergantungan terhadap beberapa langkah. Pertama, tema auditor berurusan dengan kecukupan inquiry dan pemanfaatan metodologinya. Juga auditor perlu menelaah sejauh mana seluruh data telah dimanfaatkan dalam analisis dan sejauh manakah tindak

tanduk peneliti dipengaruhi oleh persoalan praktis seperti karena pengaruh subjek. Pengaruh perasaan dan emosi dari pihak peneliti perlu pula diperiksa. Terakhir unsur-unsur rancangan penelitian yang muncul dari penelitian agar juga diperiksa dan juga auditor juga hendaknya mencatat jika sekiranya menjadi hambatan dan ketidak stabilan pada penelitian analisis kinerja pengolahan sampah di Kota Metro.

4. Konfirmabilitas/Kepastian

Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam penelitian Analisis Kinerja Pengolahan sampah di Kota Metro ini dilakukan juga dengan cara auditing kepastian data. Pertama-tama auditor perlu memastikan apakah hasil penemuannya di TPAS Kota Metro itu benar-benar berasal dari data. Sesudah itu auditor berusaha membuat keputusan apakah secara logis kesimpulan itu ditarik dan berasal dari data. Auditor juga perlu melakukan penilaian terhadap derajat ketelitian peneliti apakah ada kemencengan, memperhatikan terminologi peneliti apakah dilakukan atas dasar teori dari dasar, apakah terlalu berlebihan menonjolkan pengetahuan apriori peneliti dalam konseptualisasi penemuan dan menelaah apakah ada atau tidak intropeksi. Terakhir auditor menelaah kegiatan peneliti dalam melaksanakan pemeriksaan keabsahan data pada penelitian analisis kinerja pengolahan sampah di TPAS Kota Metro, misalnya bagaimana peneliti mengadakan triangulasi data, perpanjangan, pengamatan dan lain-lain dengan memadai .

I. Teknik Kesimpulan

a. Teknik Etik

Teknik etik mengacu kepada pandangan si peneliti (*scientist's viewpoint*). Konstruksi etik adalah deskripsi dan analisis yang dibangun dalam konteks skema dan kategori konseptual dan dianggap bermakna oleh komunitas pengamat ilmiah.

b. Teknik Emik

Teknik emik mengacu kepada pandangan warga masyarakat yang dikaji (*native's viewpoint*). Konstruksi emik adalah deskripsi dan analisis yang dilakukan dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh partisipan dalam suatu kejadian atau situasi yang dideskripsikan dan di analisis.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik kesimpulan ETIK karena peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dari proses penelitian dari pengamatan sementara, turun lapang dan sampai akhir proses penelitian dengan mendeskripsikan dan analisis yang dibangun dalam konteks skema dan kategori konseptual yang dianggap bermakna oleh komunitas pengamat ilmiah sesuai dengan penelitian peneliti.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berpijak pada hasil penelitian dan analisis mengenai penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kinerja Dari pengolahan sampah di TPAS Kota Metro mendekati cukup baik. Kualitas pengelolaan sampah maksimal yang dicapai adalah cukup baik :
 - a. Terbukti dengan kondisi kebersihan jalan utama, penempatan TPS atau kontainer, kondisi alat pengumpul sampah, kondisi alat pengangkutan sampah dan kualitas petugas kebersihan.
 - b. UPT Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Tata Kota mampu menunjukkan prestasinya, mampu menghadirkan piala Adipura, dan retribusi pun mampu dikelola dengan baik terlihat dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari retribusi kebersihan dan untuk Menjaga kebersihan Kota Metro, tentunya membutuhkan bantuan dari seluruh elemen masyarakat. Sebab kebersihan tidak akan terwujud jika tidak ada dukungan dari masyarakat dengan memiliki kesadaran membuang sampah pada tempatnya.

2. Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan :

- a. Penerapan prinsip partisipasi yaitu meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada UPT Kebersihan Kota Metro dengan volume sampah yang di hasilkan kota Metro cukup tinggi
- b. Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro yaitu dapat di lihat dari segi pekerjaan dan lamanya tinggal. Faktor jenis pekerjaan berpengaruh pada peran serta karena mempengaruhi derajat aktivitas dalam kelompok dan mobilitas individu. Jenis pekerjaan seseorang berhubungan dengan waktu luang yang dimiliki, perhatian dan lingkungan sekitar, pendapatan, wawasan, dan sedikit banyak mempengaruhi pola berpikir seseorang, Semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja maka kesempatan berperan serta semakin kecil. Lamanya tinggal memiliki keterkaitan yang kuat dengan bentuk peran serta masyarakat dalam proses keterlibatan warga dalam pertemuan, kegiatan fisik/kerja bakti. Semakin lama seseorang tinggal dan menetap di suatu Daerah pada umumnya akan memberikan pengaruh positif bagi perkembangan kehidupan psikologisnya sehingga dapat merangsang rasa memiliki yang mendalam yang pada gilirannya tumbuh kesadaran untuk memelihara, mengelola, dan mengembangkan hasil pembangunan berupa perbaikan prasarana dan fasilitas yang ada. Dalam hal ini semakin banyak jumlah tetangga yang dikenal, semakin

tinggi ikatan psikologis dengan lingkungannya yang berpengaruh pada besarnya keinginan untuk terlibat dalam kegiatan bersama.

- c. Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pada UPT Kebersihan, Kinerja pengolahan sampah yang dijalankan selama ini sudah berjalan baik dengan menempatkan tong tong sampah di tempat tempat umum, walau masih banyak terjadi kesalahan salah memasukan sampah pada tempatnya, dikarenakan kurangnya sosialisasi cara membuang sampah pada tempatnya. sehingga terjadi tercampurnya antara sampah organik (sampah basah) dedaunan dan yang mudah busuk dan anorganik (sampah kering) botol, kaleng, dan kertas.sampah organik tempatnya tong warna hijau sedang anorganik tong warna kuning, sampah yang tercampur seperti ini dapat menghambat proses pemisahan dan pengolahan sampah

3. Kendala Penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* di UPT Kebersihan Kota Metro:

- a. Kendala Sumber Daya Manusia (SDM). Di dalam Renstra Dinas Tata Kota dan Pariwisata harus menerapkan Prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, responsifitas dan sebagainya. Namun pada tahap pelaksanaannya, Dinas Tatakota dan Pariwisata masih belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip tersebut disemua unit kerja petugas kebersihan. Sebab SDM yang dimiliki UPT Kebersihan belum siap secara menyeluruh untuk menjalankan prinsip tersebut, tentu saja hal ini

kembali lagi ke individunya masing-masing belum sepenuhnya merupakan perwujudan dari prinsip *Good Governance* yang ada, karena masih belum bersifat menyeluruh.

Sedikitnya jumlah pekerja kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah yang ada Di Kota Metro serta profesionalisme pekerja dalam pekerjaannya, dimana banyak pekerja yang memiliki tingkat pendidikan dan pengetahuan yang masih rendah disertai dengan tingkat kesejahteraan pekerja juga masih rendah yaitu gaji pekerja/petugas pengangkutan sampah masih minim, dalam kondisi seperti itu maka UPT Kebersihan Kota Metro masih kesulitan untuk mencapai visinya yaitu: ***”Menjadikan organisasi yang profesional dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan lingkungan”***.

b. Finansial

Kenyataan yang ditemukan dilapangan menunjukkan bahwa finansial merupakan suatu kendala yang dihadapi oleh UPT Kebersihan dalam mencapai visi instansi. Keterbatasan alokasi anggaran APBN menjadi alasan tersendiri bagi UPT Kebersihan dalam pengelolaan sampah, sehingga program serta pembangunan infrastruktur yang telah direncanakan tidak dapat dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Terdapat beberapa gedung di UPT Kebersihan yang terbengkalai dan belum dilanjutkan proses penyelesaiannya hingga saat ini. Diantaranya yaitu terbengkalainya pembangunan dua gedung yang

telah dibangun sejak lama. Hingga saat ini, dua gedung yang memiliki ruangan yang cukup besar belum terlihat adanya perkembangan dari keberlanjutan pembangunan gedung tersebut, dan yang terlihat dari dua gedung yang terbengkalai ini hanyalah dimanfaatkan oleh petugas kebersihan sebagai tempat kosong atau gudang. Kenyataan yang dialami oleh UPT Kebersihan yang pendanaannya dibiayai oleh pemerintah, tidak menjadi jaminan lebih unggul dalam mengembangkan kebersihan lingkungan.

Dengan demikian persoalan mendasar yang menentukan unggul tidaknya instansi sangat tergantung pada kemampuan instansi untuk menciptakan, memperluas, dan menggali sumber-sumber dana baru, serta mengelola dana untuk kepentingan pasukan kebersihan secara efektif dan efisien. Persoalan dana merupakan persoalan klasik dalam suatu organisasi, namun dalam perkembangan modern saat ini sebetulnya persoalan dana dapat diatasi jika suatu organisasi di atur atau di manajemen secara professional. UPT Kebersihan sebagai instansi memiliki potensi untuk menggalang dana secara maksimal guna mendukung kegiatannya melalui pola manajemen pengetahuan. Dalam pola ini, Pengetahuan kebersihan lingkungan merupakan kebutuhan semua orang sepanjang hayat. Ilmu pengetahuan akan dikejar dan dicari oleh manusia untuk kepentingannya dalam menata kehidupan yang lebih baik.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- a. Pemerintah Kota Metro untuk segera mungkin merealisasikan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Metro, dan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang belum memadai yaitu alat penunjang kebersihan lingkungan Kota Metro, maka stakeholder bisa mengatur dari hasil pungutan biaya masyarakat yang membuang sampah untuk bisa memenuhi sarana dan prasarana tersebut, misalnya dengan cara menyisihkan sedikit hasil pungutan biaya yang dikenakan oleh masyarakat untuk ditabung dan dimanfaatkan untuk membeli sarana dan prasarana .

Pemerintah Kota Metro segera menambah jumlah pekerja/petugas UPT Kebersihan Kota Metro mengingat jumlah pekerja/petugas kebersihan tidak sebanding dengan volume sampah dikota Metro, tetapi yang amat penting peningkatan sumberdaya manusianya serta kesejahteraan bagi pekerja agar dapat menjalankan tugasnya secara maksimal tercapainya visi UPT Kebersihan Kota Metro, visinya yaitu:”***Menjadikan organisasi yang profesional dan mandiri menuju masyarakat yang sejahtera dan berwawasan lingkungan***”.

- b. Perlu ditingkatkan kembali bentuk mekanisme partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kota Metro, kepada UPT Kebersihan Kota Metro agar lebih sering melakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat dan juga terus melakukan pembinaan-pembinaan dan pelatihan-pelatihan kepada kelompok Bank Sampah yang bergerak di bidang pengelolaan sampah. Kepada UPT Kebersihan agar terus memfasilitasi pelaksanaan pengelolaan sampah di tingkat Kelurahan Kota Metro agar lebih terorganisir dan juga dapat memfasilitasi warga dalam memasarkan kompos tidak hanya dimanfaatkan sendiri, tetapi sebaliknya mendapat tambahan bagi ibu-ibu rumah tangga dan memacu pemberdayaan masyarakat.

- c. Perlu meningkatkan sumberdaya manusia dengan pengetahuan dan ketrampilan serta kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah dengan penyuluhan dan pembinaan tentang pentingnya upaya pengelolaan sampah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, Raharjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta. Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2008. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta. Kencana.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta. Kencana.
- Kusdi. 2009. *Teori Organisasi dan Administrasi*. Jakarta. Salemba Humanika.
- Manullang. 2012. *Dasar-dasar Manajem*. Yogyakarta. Gajah Mada University Press.
- Miles, Mathew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta. UI Press.
- Moleong, L.J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi: Struktur, Desain, dan Aplikasi*. Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udara, Arcan. Jakarta.
- Sallya, Rizka. 21014. *Kinerja Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Kota Bandar Lampung Dalam Mengawasi Peredaran Kosmetik Ilegal Di Provinsi Lampung*. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik, Reformasi Birokrasi, dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan Yang Baik)*. Bandung. PT Refika Aditama.
- Sugiyono. 2003. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung. Alfabeta.

- Sugiyono. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Suharko. 2005. *Merajut Demokrasi Hubungan NGO, Pemerintah, Pengembangan Tata Pemerintahan Demokratis (1966-2001)*. Yogyakarta. Tiara Wacana.
- Syahriani., Syakrani. 2009. *Implementasi Otonomi Daerah dalam Perspektif Good Governance*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Torang, Syamsir. 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung. Alfabeta.
- Tresiana, Novita. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Universitas Lampung. Penerbit Lembaga Penelitian.

Sumber-sumber lain:

- Dokumen profil TPAS Kota Metro.
- Rencana Strategis Lembaga Administrasi Negara tahun 2000-2004.
- Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008. Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).
- UNDP. 1997. *Governance for Suitable Development-A Policy Document*. New York: UNDP.
- Buku Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, 2002.

www.lan.go.id

<http://www.kajianpustaka.com/2015/02/pengertian-jenis-dan-dampak-sampah.html>

www.sebatin.com/sampah Kota Metro

Undang-undang Nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah

<http://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/politico/article/view/2581>

<http://ejournal.narotama.ac.id/files/good%20governance.pdf>

<http://www.bpkp.go.id/dan/konten/299/good-corporate.bpkp>